

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 16

TAHUN 2008

LIFTING MINYAK DIAUDIT BPK

Dua Asumsi RAPBN 2009 Disepakati

JAKARTA - Panitia Anggaran DPR dan pemerintah menyepakati dua asumsi makro dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2009, yaitu suku bunga sertifikat bank Indonesia (SBI) dan nilai tukar rupiah.

Suku bunga SBI tiga bulan ditetapkan 8%, lebih rendah dibandingkan usulan pemerintah 8,5%, sedangkan nilai tukar rupiah ditetapkan Rp 9.100 per dolar AS atau sama dengan usulan pemerintah.

Sementara itu, Panitia Anggaran DPR menunda penetapan asumsi inflasi dan pertumbuhan ekonomi, karena mereka menginginkan dua asumsi itu ditetapkan lebih optimistis.

Dalam rapat panitia kerja RAPBN 2009 mengenai asumsi makro, anggota Panitia Anggaran menginginkan tingkat inflasi ditekan lebih rendah menjadi 6,2% dari semula 6,5%. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi dinaikkan menjadi 6,5% atau lebih tinggi dibandingkan usulan pemerintah 6,2%.

"Tingkat pertumbuhan ekonomi 6,4% sesuai dengan pembicaraan pendahuluan tentang RAPBN 2009 antara Panitia Anggaran dan pemerintah. Tetapi justru pemerintah inginnya SBI dan inflasi yang dinaikkan," kata Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis disela pembahasan RAPBN 2009 di Jakarta, Kamis (4/9).

Menurut Harry, Panitia Anggaran DPR meminta pemerintah membahas kembali asumsi pertumbuhan ekonomi dan inflasi sebelum kembali dibicarakan dengan DPR. "Kami ingin tahu bagaimana postur ekonomi Indonesia bila pertumbuhan ekonomi menjadi 6,3% atau 6,4%" tutur dia.

Anggota Panitia Anggaran dari Fraksi PKS Rama Pratama menuturkan, Panitia Anggaran telah meminta pemerintah kembali meninjau beberapa asumsi dalam RAPBN 2009 karena asumsi yang diusulkan pemerintah tidak realistis.

"Kami minta pemerintah bergerak cepat, sehingga perhitungan mengenai pertumbuhan ekonomi dan inflasi bisa diserahkan besok."

Rama Pratama,
Anggota Panitia
Anggaran Fraksi PKS

DPR beranggapan asumsi makro perekonomian Indonesia bisa lebih baik lagi, yaitu dengan pertumbuhan ekonomi 6,4% dan inflasi 6,1-6,2%. "Kalangan DPR beranggapan masih ada gap yang terlalu jauh dengan *core inflation*, sehingga pemerintah diminta bekerja keras lagi agar tidak ada *gap* dengan *core inflation*," papar dia.

Namun, kata Rama, pembahasan mengenai asumsi RAPBN 2009 akan terus berjalan walaupun ada beberapa keputusan yang ditunda. "Kami minta pemerintah bergerak cepat, sehingga perhitungan mengenai pertumbuhan ekonomi dan inflasi bisa diserahkan besok (hari ini)," ujar dia.

Setelah asumsi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan SBI disepakati, menurut Rama, Panitia Anggaran DPR dan pemerintah melanjutkan pembahasan mengenai *lifting* minyak.

Harry Azhar Azis menambahkan, Panitia Anggaran DPR menginginkan pemerintah menargetkan *lifting* 950 ribu barel per hari (bph) dengan tidak menyertakan hasil *swap* Chevron sebanyak 50 ribu bph.

Namun, pemerintah meningkatkan *lifting* yang berasal dari produksi tambang minyak Cepu 20-25 ribu bph dan optimalisasi sumur-sumur tua milik Pertamina sebanyak 20-25 ribu bph. "Kalau target *lifting* 950 ribu bph termasuk *swap*, itu namanya *lifting* turun karena pada 2008 *lifting* 927 bph tanpa *swap*," ucap Harry.

BPK Audit *Lifting*

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Dradjad H Wibowo menuturkan, *lifting* minyak akan diaudit oleh BPK sesuai permintaan Panitia Hak Angket Migas DPR. "Audit tersebut paling lambat dilaksanakan setelah Lebaran," ujar Dradjad.

Audit *lifting* itu merupakan bagian dari empat permintaan DPR soal pemeriksaan migas, yakni audit produksi migas untuk menilai kewajaran produksi dan *lifting* migas. Audit tersebut juga untuk menilai keandalan sistem pengendalian intern dalam proses produksi hingga *lifting*, serta menilai pencapaian rencana pengembangan dan produksi oleh para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

"Ada indikasi operator memberikan hasil produksi tidak sesuai dengan jumlah produksi sesungguhnya. Misal produksinya sepuluh dilaporkan kurang dari sepuluh," papar dia.

Sementara itu, tiga bidang pemeriksaan lainnya, kata Dradjad adalah pemeriksaan kegiatan ekspor-impor migas, audit *cost recovery*, serta audit kebijakan produksi dan penjualan migas. (idi)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST
--	---

KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI	<input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> PANSUS ANGKET
---	---	---

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 20 TAHUN 2008

AUDIT BPK DATA LAMA

Chevron Investasi US\$ 6,9 Miliar

JAKARTA – PT Chevron Indonesia Company menyiapkan dana US\$ 6,9 miliar atau Rp 64,2 triliun untuk menggarap ladang migas di laut dalam (*deep water*) Indonesia. Investasi tersebut terkait telah disetujuinya rencana pengembangan (*plan of development*/ PoD) lima lapangan migas tersebut oleh pemerintah Indonesia. Kelima lapangan migas yang telah disetujui PoD-nya tersebut adalah Gendalo, Gehem, Maha, Gandang, dan Ranggas, yang semuanya berlokasi di Kalimantan Timur.

Deputi Perencanaan BP Migas Achmad Lutfi mengatakan, nilai investasi tersebut terdiri atas pengeboran sebanyak 28 sumur laut dalam senilai US\$ 2,196 miliar dan fasilitas produksi dari lapangan lepas pantai ke Terminal Senipah dan Samtan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim, senilai US\$ 4,788 miliar.

“Persetujuan PoD telah ditteken Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro di Jakarta pada Jumat (29/8). *Government of Income* (Gol) yang diperoleh dari lima ladang migas tersebut diperkirakan mencapai US\$ 5,7 miliar atau 29,6% dari *gross revenue*,” kata Lutfi di Jakarta, Kamis (4/9).

Menurut Lutfi, terkait persetujuan PoD tersebut, BP Migas akan mengawasi penerapan kaidah keteknikan, pengembangan masyarakat, dan penggunaan tenaga kerja (termasuk pihak ketiga).

Kerugian Negara

Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperkirakan kerugian Chevron merugikan negara hingga US\$ 1,24 miliar. Rinciannya, US\$ 1,2 miliar plus US\$ 33,9 juta oleh Chevron Pasific Indonesia terkait masalah ketidakberesan dalam kontrak pengadaan listrik dan investasi yang tidak memberikan manfaat tapi di-

klaim sebagai *cost recovery*. Selain itu, Chevron Makassar Ltd sebesar US\$ 10,2 juta terkait masalah perhitungan dan penetapan *interest recovery* yang tidak sesuai dengan klausal.

Manager Corporate Communication Chevron Santi Manuhutu yang coba dihubungi melalui telepon genggamnya tadi malam tidak bisa memberikan komentar.

Terkait kerugian negara dari ExxonMobil yang diduga menunggak pajak perseroan, bunga, dividen, dan royalti senilai US\$ 32,5 juta, *Vice President Public Affair* Exxon Indonesia Maman Budiman mengatakan, temuan BPK telah sesuai dengan mekanisme perhitungan yang berbeda antara Exxon dan Ditjen Pajak.

Menurut Maman, BPK menghendaki seluruh penerimaan migas langsung disetor ke rekening negara. Sementara itu, Exxon menghitung dari penerimaan bersih, setelah dikurangi pengeluaran yang seharusnya langsung diperhitungkan. "Masalah tersebut dalam penyelesaian antara pihak Exxon dan Ditjen Pajak," katanya, tadi malam.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto mengungkapkan, perhitungan BPK terjadi karena interpretasi yang berbeda soal laporan keuangan BP Migas dan estimasi biaya yang seharusnya masuk ke penerimaan negara sesuai kontrak. Namun, sebagian temuan tersebut benar, karena kelemahan pengawasan BP Migas, baik secara teknis maupun administrasi keuangan.

Pri menyayangkan, temuan tersebut sudah merupakan data lama. Seharusnya, saat ini BPK tidak lagi membicarakan temuan tersebut, tetapi tindak lanjut investigasi dan pengembalian penerimaan negara yang seharusnya diterima. (pya/her/c122)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 41

TAHUN 2008

Kebijakan Energi Makin Semrawut

Oleh Hari Susanto

► Ketika rumah tangga kelas menengah ke bawah sudah dikondisikan untuk menggunakan gas untuk memenuhi kebutuhan energi mereka sehari-hari, harga elpiji malah terus meningkat. Lebih memprihatinkan lagi, persediaan gas malah menghilang dari pasaran.

Menghilangnya gas tabung berukuran 12 kilogram pada akhir Agustus 2008 lalu sangat memperkeruh persoalan pasokan kebutuhan rumah tangga kelas menengah ke bawah. Hendak kembali menggunakan minyak tanah pun kini sudah nyaris mustahil. Selain harganya yang begitu melambung tinggi, minyak tanah di pasaran sudah semakin langka.

Dari satu sisi, ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah mengalihkan penggunaan energi rumah tangga dari minyak tanah ke gas alam sudah menunjukkan tanda-tanda yang baik. Bagaimanapun, dengan terus naik-

nya harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai akibat kenaikan harga internasional, itu berarti jumlah subsidi yang harus disiapkan pemerintah akan semakin besar.

Itulah dasar pijak mengapa pemerintah mengalihkan penggunaan BBM ke gas alam. Selain kebutuhan masyarakat akan energi yang relatif murah dapat terpenuhi, pemerintah juga tak perlu lagi mengeluarkan anggaran ekstra untuk menutup subsidi yang begitu besar.

Namun, kembali ke persoalan pokok, mengapa gas alam yang seharusnya dipasok untuk kebutuhan penduduk (rumah tangga) bisa menghilang,



■ Hari Susanto

sementara tabung gas ukuran 3,5 kilogram tidak diminati masyarakat?

Riwayat Kebijakan Ruwet

Pada awal Juli lalu, PT Pertamina mengumumkan kenaikan harga BBM, dan pada saat yang sama harga elpiji untuk ukuran 12 kilogram juga dinaikkan dari Rp 51.000 menjadi Rp 60.000 hingga Rp 63.000. Anehnya, meski belum ditetapkan berapa kenaikan harga tersebut, bahan elpiji di pasaran sudah tidak tersedia lagi.

Kemudian, pada akhir Agustus lalu PT Pertamina juga menaikkan harga elpiji 12 kilogram menjadi Rp 79.000 hingga Rp 80.000. Pada kenyataannya, hingga ke tangan rumah tangga harga tersebut sudah meningkat, bahkan di Ambon mencapai Rp. 125.000. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi, dan bagaimana dampaknya terhadap inflasi?

Gubernur Bank Indonesia Boediono mengatakan, kenaikan harga elpiji tidak akan memengaruhi inflasi pada Agustus maupun September 2008. Tentu, prediksi Boediono itu tidak bisa diterima mentah-mentah. Kalau barang dan jasa mengalami kenaikan akibat kenaikan harga BBM, sudah barang tentu terjadi inflasi. Intinya, kenaikan harga BBM, dipastikan akan diikuti kenaikan harga komoditas. Peningkatan harga-harga inilah yang disebut

dengan inflasi.

Persoalannya adalah, apakah kenaikan harga-harga umum itu diikuti dengan kenaikan upah dan gaji? Daya beli masyarakat akan menurun bila tidak terjadi kenaikan upah atau gaji. Tentu, mereka harus melakukan pe-

Kebijakan pemerintah menyangkut energi untuk rakyat cenderung semrawut, tak terkait secara sinergis antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Lihat saja, harga elpiji per satuannya terus naik dalam kurun waktu tidak lebih dari enam bulan terakhir.

nyesuaian-penyesuaian terhadap upah dan gaji yang harus dikeluarkannya di saat terjadi inflasi tersebut.

Sebelumnya, keputusan untuk menaikkan harga BBM hingga 30% pada Mei 2008 lalu maupun kenaikan tarif jasa jalan tol yang mencapai 12,43%, pada gilirannya juga berpengaruh terhadap hilangnya penerimaan pada petani dari harga gabah miliknya. Kalaupun naik, jelas, kenaikan penerimaan gabah petani menjadi sangat tidak berarti karena digerogeti oleh kenaikan harga-harga komoditas umum menyusul kenaikan harga BBM, gas dan tarif jasa tol tersebut.

Kenaikan harga BBM susulan, di satu sisi, memang mampu mengurangi subsidi pemerintah terhadap BBM yang mencapai Rp 250 triliun, dengan asumsi harga minyak dunia berada di level US\$ 120 per barel. Namun, di sisi lain, kenaikan harga bahan bakar minyak itu memicu kenaikan harga-harga umum. Di sinilah terjadi inflasi.

Kalau pencabutan subsidi terhadap bahan bakar minyak maupun gas alam itu dilakukan, tentu inflasi yang akan terjadi di tahun 2008 ini juga akan membubung tinggi, diduga di atas 12%, dengan asumsi inflasi rata-rata perbulannya bisa mencapai di atas 1%. Ini sudah para waki rakyat di gedung DPR RI bahwa apabila harga BBM sebesar 30%, maka hal tersebut akan memengaruhi kenaikan harga-harga umum,

merugikan kelompok masyarakat berpendapatan tetap ke bawah (*fixed income groups*).

Tidak Sinergis

Semua kerumitan berawal dari kebijakan energi. Ironisnya, kebijakan energi untuk masyarakat atau rumah tangga kelas menengah ke bawah pun tak pernah lepas dari kesemrawutan. Adalah sebuah kebijakan yang baik bila pemerintah berkehendak hati mengurangi atau menghapus subsidi minyak tanah karena alasan-alasan kenaikan harga minyak internasional. Pengalihan penggunaan minyak tanah ke gas alam adalah salah satu langkah untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga.

Karena itu, diproduksi jutaan tabung gas berukuran 3,5 kilogram untuk keperluan energi rumah tangga. Sialnya, dengan alasan pemborosan waktu karena setiap minggu harus antre untuk pembelian gas elpiji, masyarakat akhirnya meninggalkan ukuran 3,5 kilogram dan beralih ke tabung gas berukuran 12 kilogram.

Sayangnya, harga elpiji per satuannya terus naik dalam kurun waktu tidak lebih dari enam bulan terakhir. Inilah yang menjadikan kebijakan energi itu cenderung semrawut, tidak terkait secara sinergis antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Semuanya seolah terpisah, yang akhirnya membuat masyarakat tidak hanya terbebani, tapi malah makin bingung dengan kebijakan pemerintah.

Di masa mendatang, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang terkait antara satu komoditas dengan komoditas lainnya. □

dengan angka inflasi sebesar 1% setiap bulannya.

Kontribusi komponen perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar terhadap kenaikan indeks harga konsumen pada dasarnya relatif kecil. Kenaikan harga-harga konsumen pada dasarnya disebabkan oleh kenaikan harga bahan makanan. Sumbangan inflasi yang terjadi selama beberapa bulan pada 2008 ini berasal dari komponen bahan makanan.

Kontribusi komponen bahan makanan ini cenderung meningkat dalam kurun waktu tersebut. Pergeseran komponen inflasi yang bersumber dari bahan makanan inilah tentu saja akan sangat

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 20

TAHUN 2008

Harga Minyak dan Gas Dunia			
4 September 2008			
Keterangan	Tgl 02	Tgl 03	Tgl 04
<i>Nymex Crude</i>	108,54	108,64	109,53
<i>Dated Brent</i>	106,14	105,20	106,18
<i>WTI Crushing</i>	115,46	118,28	109,00
Gas		(US\$/MMBtu)	
<i>Nymex Henry Hub</i>	7,21		
<i>Henry Hub</i>	8,25		
<i>New York City Gate</i>	8,11		
Harga Mineral Dunia			
Mineral	Harga (US\$)		
Tembaga	7,359 (per ton)		
Aluminium	2,634 (per ton)		
Nikel	19,420 (per ton)		
Timah	19,395 (per ton)		
Emas	814,300 (per toz)		
Sumber: Bloomberg.com dan lme.co.uk			

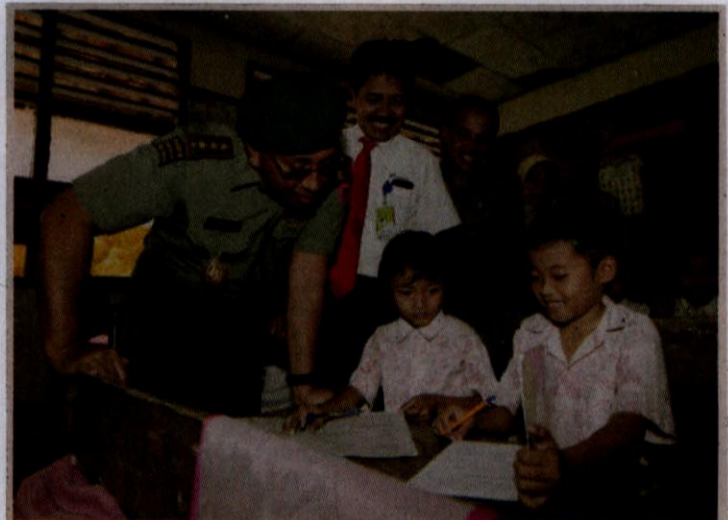
HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- | | |
|--|---|
| <input type="radio"/> BISNIS INDONESIA
<input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY
<input type="radio"/> KOMPAS
<input type="radio"/> KORAN TEMPO
<input type="radio"/> KORAN KONTAN
<input type="radio"/> MEDIA INDONESIA
<input type="radio"/> NERACA
<input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT
<input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA
<input type="radio"/> REPUBLIKA | <input type="radio"/> SUARA KARYA
<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA
<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN
<input type="radio"/> SINAR HARAPAN
<input type="radio"/> TABLOID KONTAN
<input type="radio"/> THE JAKARTA POST
<input type="radio"/> MAJALAH GATRA
<input type="radio"/> MAJALAH TEMPO
<input type="radio"/> MAJALAH TRUST |
|--|---|

- KODE: LISTRIK MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI UMUM
 MIGAS GEOLOGI PANSUS ANGKET
 ENERGI ALTERNATIF

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN: 10 TAHUN 2008



Bantuan Pertamina-Kostrad
 Pangkostrad Letjen TNI George Toisutta (kiri) didampingi *Vice President Communication* PT Pertamina (Persero) Wisnuntoro (dua dari kiri) dan Wakil Bupati Bekasi Darip Mulyana (tiga dari kiri) memperhatikan para siswa belajar usai penyerahan bantuan sarana pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (4/9). Bantuan tersebut atas kerja sama Pertamina dan Kostrad.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST																																												
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI	<input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> PANSUS ANGKET																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 8.33%;">JAN</td> <td style="width: 8.33%;">FEB</td> <td style="width: 8.33%;">MAR</td> <td style="width: 8.33%;">APR</td> <td style="width: 8.33%;">MEI</td> <td style="width: 8.33%;">JUN</td> <td style="width: 8.33%;">JUL</td> <td style="width: 8.33%;">AGST</td> <td style="width: 8.33%; text-align: center;">SEP</td> <td style="width: 8.33%;">OKT</td> <td style="width: 8.33%;">NOV</td> <td style="width: 8.33%;">DES</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </table>			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
HALAMAN : 2											TAHUN 2008																																		

Kaligis: Mitsubishi Curang

JAKARTA – Perusahaan multinasional asal Jepang, Mitsubishi Corporation, dinilai telah berbuat curang dalam rencana pembangunan kilang gas alam cair (*liquefied natural gas/LNG*) Senoro di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Kecurangan yang dilakukan Mitsubishi antara lain tetap 'nekat' bermitra dengan PT Pertamina dan PT Medco E&P Tomori Sulawesi untuk membangun kilang LNG Senoro.

"Padahal, PT LNG Energi Utama (LEU) telah menandatangani *exclusivity agreement* dengan Pertamina dan Medco pada 31 Mei 2005," ujar kuasa hukum LEU Otto Cornelius Kaligis kepada *Investor Daily* di Jakarta, Kamis (4/9).

Sebelumnya diberitakan, Jumat (29/8), Pertamina dan Medco menandatangani *head of agreement* (HoA) jual beli gas dari lapangan Senoro dan Matindo senilai US\$ 16 miliar atau sekitar Rp 146,54 triliun kepada PT Donggi Senoro LNG (SDLNG). Sebanyak 51% saham DSLNG dikuasai Mitsubishi, sisanya dimiliki Pertamina dan Medco.

Kaligis menilai, ada indikasi tidak baik yang dilakukan Mitsubishi agar bisa diikutsertakan dalam proyek pembangunan kilang LNG Senoro.

Menurut dia, Mitsubishi harusnya mengetahui ada perusahaan lain yang telah berkomitmen untuk kerja sama. "Apa motif Mitsubishi masuk ke proyek itu padahal mereka tahu ada pihak lain yang telah mendapat izin amdal?" ujar dia.

Dengan pertimbangan itu, menurut Kaligis, kliennya mengadukan Mitsubishi ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Jumat (28/8) pekan lalu. PT LEU menduga ada pelanggaran terhadap UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. "Akibat peristiwa tersebut, klien kami harus rugi US\$ 709 juta. Ini adalah kerugian yang diderita LEU karena perilaku antipersaingan yang diduga dilakukan Mitsubishi terhadap LEU," jelas Kaligis.

Dia menilai, akibat perilaku antipersaingan yang diduga dilakukan Mitsubishi, LEU tidak dapat melaksanakan proyek hilir pabrik kilang LNG Senoro. Selain itu, kesempatan LEU untuk memasuki pasar di Indonesia pun menjadi terhambat. Padahal, LEU telah memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut. "Mitsubishi telah memenuhi unsur pelanggaran pasal 20 UU No 5 Tahun 1999," katanya. (her)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN: 20

TAHUN 2008

GAS

PGN Minati Tangguh

JAKARTA – PT PGN Tbk berminat untuk membeli 1,5 juta ton per tahun (*million ton per annum/mtpa*) gas dari ladang gas alam cair (LNG) Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat yang akan dialokasikan untuk proyek pengembangan kilang gas alam cair (LNG) di Cilegon, Banten. Proyek ini dikelola bersama oleh PGN, Pertamina, dan PT PLN. Direktur Utama PGN Hendi Santoso di Jakarta, Kamis (4/9), mengatakan, pihaknya telah berbicara serius soal ini dengan Badan BP Migas. Sekretaris Perusahaan PGN Heri Yusup menambahkan, PGN tidak secara spesifik memilih membeli gas dari Tangguh. Selain berusaha memperoleh pasokan gas dari Tangguh, PGN akan memperoleh 1,5 MTPA dari lapangan Bontang, Kalimantan Timur. (pya)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 3

TAHUN 2008

KUALA LUMPUR

Jelang Lebaran, Malaysia Pangkas Harga Solar

PEMERINTAH Malaysia memutuskan untuk memangkas harga solar bagi bahan bakar bus menjelang Lebaran. Harga bahan bakar yang tinggi menyebabkan ribuan orang terancam tidak memperoleh tiket bus untuk pulang ke kampung halaman mereka.

Berbagai kekhawatiran menghantui para pemudik yang akan membanjiri terminal di kota-kota besar. Sebagian besar perusahaan transportasi menyatakan, tiket bus akan dijual pada beberapa pekan mendatang menjelang hari libur Lebaran yang menandakan akhir puasa di bulan Ramadhan.

Menteri Perdagangan dan Konsumsi Dalam Negeri Shahrir Samad menyatakan, pada Rabu (3/9) kabinet menyetujui penyediaan dana sebesar 150 juta ringgit untuk menyubsidi solar bagi 2.000 bus tambahan hingga puncak liburan pada pertengahan Oktober mendatang. "Kami tidak ingin ada yang mengganggu para pemudik," kata Shahrir, seperti dikutip AP, Kamis (4/9).

Idul Fitri merupakan hari raya terbesar bagi umat Muslim Melayu yang meliputi hampir 60% dari 27 juta penduduk Malaysia. Jutaan pemudik kota pulang ke kampung halaman mereka setiap tahun untuk merayakan Hari Raya Lebaran.

Harga solar per liter saat ini sebesar 2,5 ringgit, sedangkan harga pada Mei lalu hanya sebesar 1,58 ringgit. Sama seperti kebanyakan negara Asia lainnya, Malaysia juga menaikkan harga eceran di pusat pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk memangkas subsidi. Kenaikan tersebut dipicu oleh kenaikan harga minyak dunia. (c116)

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

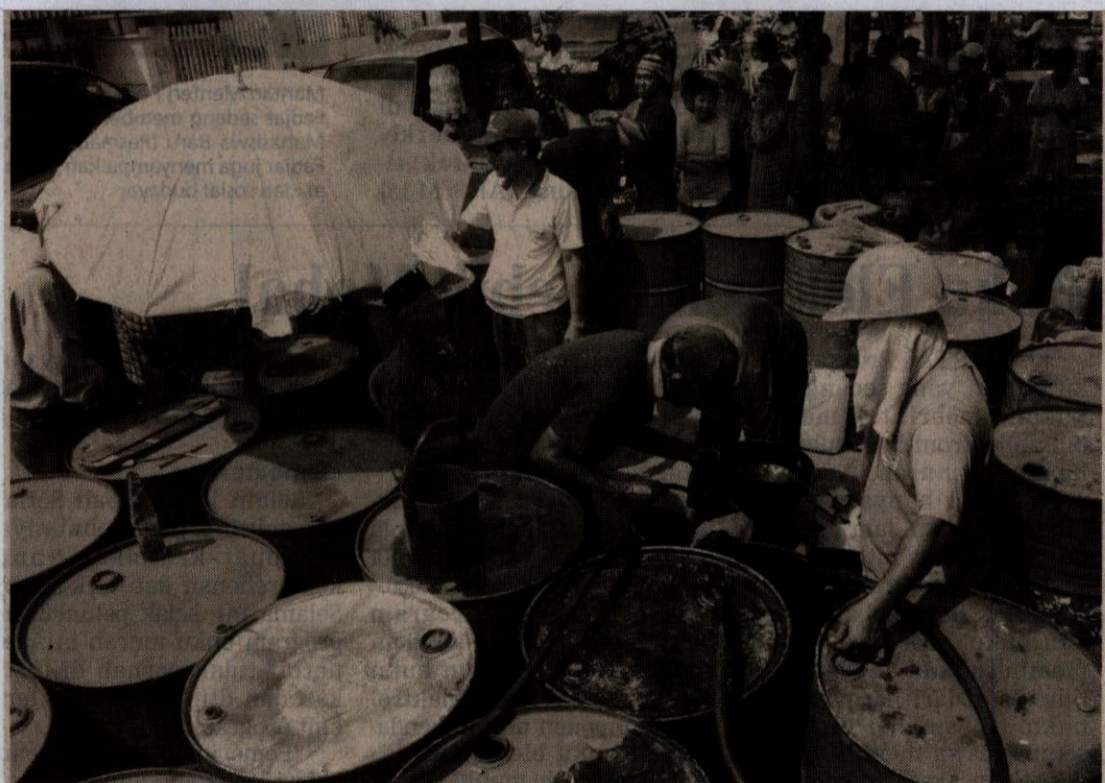
UMUM

PANSUS ANKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 13

TAHUN 2008



ANTRE MINYAK - Puluhan warga antre untuk mendapatkan minyak tanah di salah satu agen minyak tanah di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (3/9). Antrean tersebut dipicu oleh kenaikan elpiji beberapa hari lalu.

ANTARA/ERIC IRENG

28

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input checked="" type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST 	
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI	<input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> PANSUS ANGKET
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 11		TAHUN 2008

Rakyat Papua Dukung Renegosiasi LNG Tangguh

[JAKARTA] Rakyat di Provinsi Papua Barat mendukung langkah yang diambil pemerintah dalam renegosiasi kontrak penjualan gas alam (*liquefied natural gas/LNG*) Tangguh asal Kabupaten Teluk Bintuni melalui pembentukan tim negosiasi baru.

Hal ini sangat penting karena berpengaruh terhadap dana bagi hasil antar pemerintah pusat, BP Indonesia sebagai kontraktor pemerintah dan pemerintah Provinsi Papua Barat.

Namun, diharapkan pemerintah dan BP Indonesia menyelesaikan ganti rugi hak-hak masyarakat adat di sekitar lokasi eksploitasi LNG Tangguh.

Hal itu dikemukakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal Daerah Pemilihan Papua Barat, Robert Kardinal dan Ketua Dewan Adat Wilayah III Kepala Burung, Apo-

los Sewa yang dihubungi SP melalui telepon seluler secara terpisah di Jakarta dan Jayapura, Papua, Rabu (3/9) petang.

Menurut Kardinal, dengan nilai penjualan yang lebih tinggi dari nilai kontrak awal US\$2,6 per mmBtu menunjukkan pemerintah memperhatikan kepentingan negara dan hak-hak daerah khususnya pembagian hasil pertambangan gas 70 persen sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Dikatakan, apabila dalam renegosiasi harga penjualan LNG Tangguh, pemerintah mengalami hambatan dan pemerintah Tiongkok tidak menaikkan harga pembelian, sebaiknya dibatalkan.

Sementara itu, Aplos Sewa yang tengah mengikuti pertemuan Dewan Adat Papua (DAP) mengharapkan renegosiasi

penjualan LNG Tangguh dengan pemerintah Tiongkok harus menguntungkan semua pihak termasuk masyarakat adat.

Perusahaan Gas Negara (PGN) menyatakan ketertarikannya membeli LNG Tangguh. Presiden Direktur PGN, Hendi P Santoso mengatakan, PGN telah memasukkan proposal kepada BP Migas dan BP Tangguh untuk membeli LNG sebesar 1,5 miliar metrik ton gas setiap tahun.

"Kami sedang menunggu keputusan pemerintah, apakah dikasih pemerintah yang berhak jawab. Jika sudah ada kepastian dari regulator soal harga dan kepastian pasokan gas kami siap melakukan konstruksi," ujar Hendi di Jakarta, Rabu (3/9).

PGN membutuhkan 1,5 miliar metrik ton untuk memenuhi kebutuhan gas di Pulau Jawa. [DLS/154/GAB/W-8]

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 12

TAHUN 2008

Harga Elpiji Tidak Akan Naik Lagi

[JAKARTA] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk tidak menaikkan lagi harga elpiji 12 dan 50 kg sampai tahun depan. Dia juga menjamin ketersediaan elpiji 3 kg, yang sudah mulai langka di pasaran. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir.

Presiden Yudhoyono menegaskan hal itu kepada wartawan di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (3/9), setelah menerima pelaksana tugas Menteri Koordinator Perekonomian, Sri Mulyani, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Sofyan Djalil, dan Menteri Negara Ener-

gi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro. Dalam pertemuan itu, Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara, Hatta Radjasa dan Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi.

Penegasan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan lagi harga elpiji 12 dan 50 kg sampai tahun depan juga disampaikan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, sesaat setelah bertemu Presiden.

Demikian juga Deputy Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya. "Telah diputuskan bahwa elpiji 12 kg tidak akan naik hingga akhir tahun,"

kata Hanung di Jakarta, Rabu. Artinya, kenaikan elpiji 12 kg Rp 500/kag/bulan batal dilakukan.

Pertamina menjamin stok elpiji selama Lebaran akan aman sekitar 18 hari.

Lebih lanjut, Presiden Yudhoyono mengatakan, kenaikan elpiji yang baru dilakukan tidak akan terjadi lagi. Meskipun sebelumnya diputuskan bahwa harga elpiji akan mengalami kenaikan setiap bulan. "Kenaikan sekali itu, selesai di situ," kata Presiden di depan ruang kerjanya.

Terkait dengan sim-pang-siurnya informasi kenaikan harga elpiji

ini, Presiden Yudhoyono mengaku, sudah menegur pejabat-pejabat Pertamina, Kementerian BUMN, dan menteri-menteri terkait karena komunikasi yang tidak rapi, terkait kebijakan menaikkan harga elpiji tersebut.

Masalah Baru

Presiden Yudhoyono, tidak mau sebuah kebijakan yang diambil justru menimbulkan masalah baru. Setiap kebijakan, lanjut Presiden Yudhoyono, harus memperhitungkan dampak ekonomi dan politiknya, apalagi dalam situasi bulan puasa seperti ini. Karena masalah elpiji

itu menyangkut hajat hidup orang banyak.

Presiden Yudhoyono juga memahami kekhawatiran pihak Pertamina, yang takut disalahkan karena ada selisih harga, bila harga elpiji tidak dinaikkan. Sehubungan dengan itu, Presiden Yudhoyono menegaskan, selisih harga itu ditanggung pemerintah dari deviden Pertamina itu sendiri. Karena itu, Pertamina tidak perlu khawatir disalahkan.

Sementara itu, terkait kelangkaan elpiji 3 kg, Presiden Yudhoyono meminta agar masalah itu diatasi dengan cepat. Jangan sampai rakyat sudah tidak meng-

konsumsi minyak tanah, tetapi mendapatkan elpiji 3 kg juga susah. Karena itu, ketersediaan elpiji 3 kg di pasaran harus betul-betul dijamin.

Sedangkan, Sofyan Djalili menambahkan, meskipun elpiji 12 dan 50 kg bukan jenis elpiji bersubsidi, pemerintah tidak akan menaikkan lagi elpiji itu hingga tahun depan.

Walaupun elpiji 12 dan 50 kg itu belum mencapai harga keekonomiannya. Sesungguhnya, harga keekonomian elpiji 12 dan 50 kg adalah Rp 10.000/kg. Sedangkan, Pertamina saat ini menjualnya seharga Rp 5.750/kg. [DLS/A-21]

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input checked="" type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST
--	---

KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI	<input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> PANSUS ANGKET
---	---	---

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 14												TAHUN 2008																		

Presiden Minta Cina Mau Negosiasi Ulang Harga Gas

Purnomo mengaku, sejak 1981, tak ada yang mau membeli ladang gas Tangguh.

JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Cina bersedia melakukan renegotiasi kontrak gas alam cair (LNG) Tangguh yang dijual ke Provinsi Fujian. Permintaan ini disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Partai Komunis Republik Rakyat Cina dari Provinsi Guangdong, Wan Yang, dalam pertemuan di kantor Presiden kemarin.

Menurut juru bicara Presiden, Dino Patti Djalal, Presiden mengatakan perubahan situasi dan harga minyak dunia menyebabkan harga jual ke Cina juga harus disesuaikan. "Presiden ingin agar harga penjualan gas ke Fujian disesuaikan," kata Dino sesuai pertemuan.

Ketika bertemu dengan Wakil Presiden Cina Xi Jinping di Beijing pada 24 Agustus lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sudah membahas masalah itu.

Dalam pertemuan kemarin, Yang mengatakan akan mencatat permintaan Presiden Yudhoyono. Ia menekankan masalah renegotiasi kontrak LNG itu sudah ditangani oleh Wakil Presiden. Yang juga merupakan anggota Politbiro Komite Sentral Komunis Cina.

Ketika dikonfirmasi alasan gas Tangguh dijual murah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, sejak dieksplorasi pada 1981, tidak ada yang mau mengembangkan atau membeli proyek itu.

Selama 20 tahun proyek Tangguh mati. Proyek itu juga sudah ditawarkan ke dalam negeri. "Baru tahun 2000-an ada sinyal ada yang akan membeli LNG Tangguh," kata Purnomo pada kesempatan terpisah.

Waktu itu, dia menambahkan, Indonesia sudah kalah tender untuk memasok gas alam cair ke Provinsi Guangdong. Tapi, karena hubungan Indonesia-Cina cukup dekat, pemerintah Cina kemudian memberikan kesempatan ke Indonesia untuk memasok ke Provinsi Fujian dengan harga sesuai dengan pembeli (keinginan Cina).

Masalah harga yang dipatok US\$ 2,4 per *million British thermal unit* (mmBtu) selama 25 tahun, menurut Purnomo, masih bisa berubah melalui proses negosiasi. "Pemerintah sudah nego terus sejak 2006," ujarnya.

Pada 2006, pemerintah memang telah melakukan renegotiasi dan berhasil menaikkan harga menjadi US\$ 3,35 per mmBtu. Tapi itu pun tetap dianggap terlalu murah dibanding harga gas alam cair di pasar dunia yang saat ini US\$ 20 per mmBtu.

Dengan harga yang dipatok *flat* selama 25 tahun itu, menurut Kalla, Indonesia berpotensi rugi hingga Rp 700 triliun. Namun, Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Ganjar Pranowo mempertanyakan potensi kerugian itu. "JK itu memakai data mana hingga negara rugi Rp 700 triliun?" ujar Ganjar, Rabu lalu. • NININ DAMAYANTI | SORTA TOBING | HERU TRIYONO

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input checked="" type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST										
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> PANSUS ANGKET <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF											
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES											
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN: #11										TAHUN 2008	

Renegosiasi Kontrak LNG Tangguh

Pemerintah berencana melakukan negosiasi ulang kontrak *liquefied natural gas* (LNG) Tangguh, Papua, antara Indonesia dan RRC yang dibuat pada 2002 (masa pemerintahan Presiden Megawati). Negosiasi ulang kontrak tersebut dilakukan karena dinilai sangat merugikan Indonesia. Tak pelak, kubu Megawati (PDIP) membantah tuduhan bahwa kontrak ini sangat merugikan Indonesia. PDIP beralasan, pada saat itu pihaknya berkompetisi dengan negara lain untuk menjual, sementara negara pembelinya terbatas di dunia. Jadi, harga tersebut sudah berdasarkan kondisi saat itu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat memberi pengantar rapat kabinet paripurna di kantor Presiden, Jakarta, Kamis lalu (28 Agustus), mengemukakan bahwa upaya negosiasi ulang kontrak gas Tangguh untuk Provinsi Fujian, Cina, dilakukan untuk mencegah potensi kerugian negara. Kalau tidak diperbaiki, akan besar sekali kerugian negara dibanding kontrak-kontrak gas lain seperti di Bontang (Kalimantan Timur) dan Arun (Aceh).

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut kontrak itu sebagai kontrak terburuk sepanjang sejarah. Alasannya, Indonesia menjual hasil gas alam ini dengan harga yang sangat murah. Jika tidak dilakukan negosiasi ulang, Indonesia dirugikan US\$ 75 miliar selama 25 tahun kontrak. Sebab, harga jual yang ditetapkan saat itu *flat* sebesar US\$

3,3 per mmBtu, jauh di bawah harga LNG di pasar internasional saat ini, yaitu sekitar US\$ 20 per mmBtu.

Pemerintah Cina menilai kontrak LNG dari Lapangan Tangguh, Papua, ke Fujian sudah dalam koridor yang saling menguntungkan. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Cina yang baru untuk Indonesia, Zhang Qiyue. Menurut dia, semua pihak mesti melihat kembali sejarah kontrak yang telah ditandatangani pada 2002. Saat itu kontrak tersebut didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan dilakukan secara *government to government* (G to G). Prinsip inilah yang diinginkan pemerintah Cina dan berharap kerja sama ini akan terus berlanjut. Meskipun demikian, pemerintah RRC bersedia melakukan pembicaraan ulang kontrak LNG Tangguh di Papua.

Diharapkan, negosiasi ulang ini bisa mengubah kontrak LNG, yaitu harga jual gas alam ini harus lebih tinggi daripada harga jual sebelumnya seperti yang diteken pada 2002. Sebab, jika hal ini tidak dilakukan, potensi kerugian negara mencapai US\$ 75 miliar atau lebih dari Rp 750 triliun (dengan perhitungan harga jual yang diteken 2002, dikalikan kontrak selama 25 tahun). Kontrak gas Tangguh ini hanya merupakan salah satu dari sekian banyak yang harus dievaluasi.

Negosiasi ulang ini juga menunjukkan bahwa kontrak penjualan gas LNG Tangguh ke Fujian, Cina, selama ini banyak ketidakberesan dan penuh kejanggalan. Karena itu, hal tersebut sangat perlu dilakukan untuk mengungkap ketidakberesan tersebut dan hendaknya dilakukan dengan transparan. Di samping itu, kita juga berharap kasus ini tidak dijadikan polemik oleh masyarakat karena dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh kalangan tertentu menjelang 2009.

Mila

Kukusan Beji, Depok
Jawa Barat

32

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input checked="" type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST	
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI	<input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> PANSUS ANGKET
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN: 11		TAHUN 2008

PDIP Jangan Hanya Menggertak

Jakarta—Ancaman Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mengungkap kasus-kasus KKN yang melibatkan pemerintah jangan hanya menjadi ajang politisasi.

Oleh
**NINUK CUCU SUWANTI/
DINA SASTI DAMAYANTI**

Sebaliknya, PDIP perlu segera membuka kasus-kasus tersebut supaya rakyat tidak dirugikan. Jika PDIP tak bisa menunjukkan kasus-kasus itu maka ancaman partai berlambang banteng moncong putih tersebut bisa dinilai hanya sebuah langkah gertak sambal untuk menangkis tuduhan yang mulai mengarah pada Megawati Soekarnoputri.

Demikian disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (4/9). "Kalau PDIP mau membuka itu bagus. Karena lapor melapor itukan strategi untuk setiap warga negara seperti yang dianjurkan oleh KPK, cari, lihat dan laporkan. Jadi kalau PDIP punya bukti laporkan saja ke KPK biar bisa

ditindaklanjuti," katanya.

Maswadi menilai positif reaksi PDIP tersebut. Apalagi, reaksi tersebut mendorong pada arah keterbukaan informasi atas segala proyek yang berbau KKN. Namun, supaya bisa ditindaklanjuti oleh KPK ataupun lembaga lainnya, dan bermanfaat untuk rakyat, ancaman PDIP tersebut harus didukung dengan fakta-fakta. Sebab, tanpa fakta, tuduhan politisasi justru akan dengan mudah akan diarahkan kepada PDIP yang selama ini dianggap membabi buta membela anggotanya.

Ia juga berpendapat, PDIP tidak bisa mendesak pemerintah untuk membuka kasus-kasus lain sebagaimana diinginkan oleh partai tersebut.

Selain terbatas dengan data-data, pemerintah kemungkinan enggan untuk membuka kembali kebijakan yang telah mereka buat. Karenanya, PDIP harus membuka kasus tersebut, jika

memang partai tersebut peduli - seperti yang dingkapkan selama ini - peduli pada nasib "wong cilik".

"Pernyataan selama ini yang menyebut bahwa LNG Tangguh itu adalah politisasi terhadap PDIP itu reaksi kuno. Hak setiap warga negara untuk membongkar kejahatan. Apa salahnya politisasi? Makanya kalau tidak mau dipolitisasi kerja yang baik jangan bikin kesalahan," paparnya.

Copot Menteri ESDM

Di bagian lain, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mendengarkan secara serius apa yang menjadi tuntutan rakyat dan Komisi Penyelamatan Kekayaan Negara (KPKN), menyusul terjadinya kisruh penjualan gas Tangguh ke Fujian, Cina di masa pemerintahan Kabinet Gotong Royong Presiden Megawati Soekarnoputri 2001-2004.

Terkait hal ini, Hidayat menilai wajar jika Presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro. Pasalnya, saat Purnomo menjabat sebagai

Menteri ESDM, beragam hal terjadi hingga membuat ekonomi dan pemerintah Indonesia gonjang-ganjing lewat kebijakan perminyakan yang dibuatnya. Hal ini dicermati saat ada kenaikan harga minyak, negara-negara pengeksport minyak dan OPEC diuntungkan, sedangkan Indonesia justru merugi.

Namun jika Presiden tetap mempertahankan Purnomo sebagai Menteri ESDM, maka Presiden Yudhoyono harus bisa mengukur dampak-dampak negatifnya. Jika pada akhirnya Presiden mencopot jabatan Purnomo dari Menteri ESDM, Hidayat meminta keputusan itu dilakukan bukan berdasarkan tekanan.

Tapi kebijakan hak prerogatifnya sebagai Presiden setelah melakukan kajian mendalam, dimana Presiden menilai Purnomo sudah tidak bisa lagi sejalan dengan Presiden.

"Saya kira Presiden Yudhoyono mendengar secara cermat sebuah masalah yang ada. Dan saya kira ini bukan suatu hal yang sederhana," tegas Hidayat yang ditemui saat rehat acara pembekalan calon anggota dewan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (3/9).

Hidayat menambahkan,

jika akhirnya Purnomo dipecat sebagai Menteri ESDM, sesungguhnya masih banyak pakar atau birokrat yang pantas menjadi calon Menteri ESDM. Bila Presiden mengganti orang yang dipersepsikan merugikan negara lewat kebijakan-kebijakannya, kemungkinan bisa mendongkrak citra SBY.

"Mungkin akan mengangkat citra Presiden karena beliau dipersepsikan tegas, bisa mengoreksi yang tidak lagi merugikan rakyat dan menyusahkan pemerintah karena disalahi oleh rakyat," tandasnya.

Di tempat terpisah, Purnomo mengatakan, terkait diberhentikan atau tidak dirinya sebagai Menteri ESDM, diserahkan kepada Presiden. "Yang memberhentikan saya kan Presiden," cetusnya ketika ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/9).

Sementara itu, Presiden PKS Tifatul Sembiring menyatakan dukungannya atas renegosiasi dalam proyek kontrak gas Tangguh. Tifatul menegaskan bahwa, pemerintah siapa pun, kapan pun, harus bertanggung jawab terhadap kebijakan yang telah dilakukan. "Kebijakan itu bisa ditinjau ulang, kalau keliru harus siap dikoreksi," ujar Tifatul. (**tutut herlina**)

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST
--	---

KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI	<input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> PANSUS ANKGET
---	---	---

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 13												TAHUN 2008																		

LNG TANGGUH

Pemda Minta Dilibatkan dalam Proses Renegosiasi

JAKARTA (MI): Masyarakat Teluk Bintuni mendukung langkah pemerintah pusat yang ingin menegosiasi ulang kontrak LNG Tangguh yang ditandatangani mantan Presiden Megawati. Langkah itu dianggap sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Teluk Bintuni yang selama ini tidak pernah mendapat insentif nyata dari adanya proyek kilang gas ini.

"Kami mendukung adanya renegosiasi tersebut untuk mendapat harga jual yang pantas dari usaha yang dilakukan di daerah Teluk Bintuni. Seharusnya, harga jual dikenakan tidak secara flat, tapi naik sesuai dengan harga pasar," ujar Bupati Teluk Bintuni Alfons Manibui di Jakarta, kemarin.

Alfons mengatakan sebagai daerah pemekaran yang baru saja berdiri, Pemerintah Daerah (Pemda) Teluk Bintuni tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan kontrak yang dilakukan pemerintah pusat. Oleh karena itu, ia berharap dalam proses mendatang, pemerintah daerah diizinkan untuk terlibat dalam pembuatan kontrak baru, setidaknya berperan sebagai saksi. Hal ini dimaksudkan agar mereka bisa menjelaskan kepada masyarakat manfaat dari adanya proyek tersebut bagi masyarakat.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Yoris Raweyai mengatakan jika pemerintah tidak memprioritaskan pembahasan kontrak ulang tersebut mengenai peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerintah akan kehilangan kepercayaan dari rakyat Papua.

Masyarakat Papua berencana untuk mengajukan gugatan hukum atas kontrak yang dianggap merugikan masyarakat kepada Megawati. Megawati dianggap pihak yang paling bertanggung jawab karena dia yang menandatangani kontrak tersebut.

Fokus tiga hal

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto meminta tim pemerintah fokus pada tiga hal dalam proses renegosiasi kontrak LNG Tangguh. Dari ketiga hal yang mesti menjadi fokus adalah penghilangan batas atas dalam penentuan harga. Selanjutnya, penerapan ketentuan kewajiban pasok ke dalam negeri (*domestic market obligation/DMO*) dan fleksibilitas kontrak seperti kontrak dapat ditinjau kembali setiap dua tahun. Menurut Pri, pemakaian batas atas harga Tangguh, sangat merugikan Indonesia. **(Pia/E-3)**

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST
--	---

KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI	<input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> PANSUS ANGKET
---	---	---

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 13 TAHUN 2008

Harga Minyak Asia Stabil

HARGA minyak dunia di pasar Asia stabil. Pada perdagangan kemarin, harga minyak berada di kisaran US\$109 per barel. Meskipun stabil, pelaku pasar mulai mengkhawatirkan penurunan permintaan dari negara konsumen utama minyak. Sebelumnya, kekhawatiran dipicu serangan badai Gustav di AS. Badai memporak-porandakan kawasan itu hingga ke area produksi minyak di Teluk Meksiko. Peristiwa itu sempat menurunkan harga minyak lebih dari US\$6 per barel sejak Jumat pekan lalu. Meski pasar diselimuti kekhawatiran, harga minyak Asia hanya terkoreksi sedikit. (AFP/E-4)

35

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST 																																												
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI	<input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> PANSUS ANGKET																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">AN</td> <td style="width: 10%;">FEB</td> <td style="width: 10%;">MAR</td> <td style="width: 10%;">APR</td> <td style="width: 10%;">MEI</td> <td style="width: 10%;">JUN</td> <td style="width: 10%;">JUL</td> <td style="width: 10%;">AGST</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><u>SEP</u></td> <td style="width: 10%;">OKT</td> <td style="width: 10%;">NOV</td> <td style="width: 10%;">DES</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </table>			AN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	<u>SEP</u>	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	<u>SEP</u>	OKT	NOV	DES																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
HALAMAN: 7		TAHUN 2008																																											

Harga Elpiji Tidak Akan Naik Lagi

Seiring dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah, PT Pertamina (Persero) tidak menaikkan harga elpiji selama bulan puasa hingga akhir tahun 2008 ini. Dengan demikian, juga membatalkan rencana kenaikan harga elpiji kemasan 12 kilogram (kg) sebesar Rp 500 per kg setiap bulan.

"Tidak ada kenaikan harga elpiji lagi," kata Deputy Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya, ketika ditanya tentang rencana kenaikan tersebut di Jakarta, kemarin.

Hanung meminta masyarakat tidak perlu khawatir Pertamina akan menaikkan harga elpiji lagi. Apalagi, lanjut dia, selama masa puasa hingga lebaran mendatang. Pertamina, juga menjamin stok elpiji aman sampai lebaran yakni hingga 18 hari ke depan.

Vice President Pemasaran BBM Ritel PT Pertamina

Djaelani Sutomo mengatakan, pasokan aman dan tidak ada kenaikan.

Rencana kenaikan harga elpiji 12 kg sebesar Rp 500 per kg per bulan tersebut mendapat banyak protes. Mulai 25 Agustus 2008 atau sepekan menjelang bulan Ramadhan, harga elpiji naik 9,5 persen dari Rp 5.250 per kg menjadi Rp 5.750 per kg atau Rp 69.000 per tabung ukuran 12 kilogram.

Sedangkan kemasan 50 kg dari harga Rp 6.878 per kg menjadi Rp 7.255 per kg, sedangkan elpiji 3 kg masih tetap yaitu Rp 4.250 per kg atau Rp 12.750 per tabung.

Padahal sebelumnya pada 1 Juli, Pertamina telah menaikkan harga elpiji ukuran 12 kilogram naik dari Rp 4.250 menjadi Rp 5.250 per kg atau naik 17,64 persen menjadi Rp 63.000 per tabung.

Dirjen Migas Departemen Energi dan Sumber

Daya Mineral Evita H Legowo mengatakan, pihaknya telah meminta Pertamina untuk tidak menaikkan lagi harga elpiji selama bulan puasa hingga Lebaran.

"Sementara ini, kita minta Pertamina tidak menaikkan harga elpiji cuma selama puasa hingga Lebaran," ujarnya.

Terkait melonjaknya harga elpiji 3 kg hingga Rp 17.000 per tabung, Evita mengatakan akan melakukan verifikasi pengadaan, konsumen dan harga pada pekan ini.

Harga gas elpiji ukuran 3 kg seharusnya Rp12.750 per tabung karena mendapat alokasi subsidi oleh pemerintah. "Yang 3 kg masih disubsidi pemerintah, jadi itu tanggung jawab pemerintah akan kita lakukan verifikasi hingga Desember," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil

usai rapat di Kantor Kepresidenan menjelaskan, pemerintah memutuskan agar Pertamina tidak boleh lagi menaikkan harga elpiji tabung 12 kg dan 50 kg setelah menaikkan harga Rp 500 per kg pada bulan lalu.

Guna mengatasi kerugian yang dialami Pertamina apabila perusahaan negara itu tidak menaikkan harga elpiji, Meneg BUMN mengatakan, Pertamina dapat dikurangi devidennya. Namun, Sofyan belum menyebutkan sampai angka berapa deviden itu akan dikurangi. "Itu harus dihitung dulu. Bagaimana cara menghitungnya itu belum bisa saya jelaskan," ujarnya.

Selain memutuskan Pertamina tidak lagi boleh menaikkan harga elpiji, pemerintah juga memerintahkan Pertamina agar menyuplai ketersediaan elpiji di pasar secara maksimum. (A Choir)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 2

TAHUN 2008

JELANG LEBARAN

Stok BBM dan Elpiji Ditingkatkan

Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji bagi masyarakat selama puasa dan Lebaran dipastikan akan terus terpenuhi. PT Pertamina (Persero) menjamin stok BBM dalam kondisi aman, mengingat telah ditingkatkannya stok 18 hingga 20 hari kebutuhan harian secara nasional. Tercatat kebutuhan harian nasional untuk BBM jenis premium mencapai 55.000 kiloliter (kl).

Deputi Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya menjelaskan, pihaknya telah meningkatkan stok BBM sejak beberapa waktu lalu, sehingga diharapkan tidak terjadi masalah pasokan BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang melayani masyarakat. "Kita sudah mulai *gear up stock* BBM sejak beberapa waktu lalu. Jadi tidak ada masalah apakah kilang kita sedang mengalami perawatan atau ada masalah," katanya

Bahkan, dia mempre-

diksi, pada saat lebaran nanti pasokan secara nasional akan mencapai 19 hingga 20 hari kebutuhan harian nasional. "Pada saat Lebaran biasanya kebutuhan premium naik rata-rata 14 hingga 15 persen dari kebutuhan normal. Tapi solar turun 5 persen karena angkutan besar agak berkurang, terutama angkutan truk karena tidak boleh jalan," katanya.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, yaitu elpiji, Pertamina jua menambah stok hingga 18 hari ke depan. "Selain BBM untuk transportasi umum, stok elpiji kebutuhan rumah tangga juga kami tingkatkan. Jadi kondisinya aman," ujarnya.

Menurut dia, saat awal-awal puasa, konsumsi BBM dan elpiji secara umum tidak mengalami lonjakan. Hanya saja, beberapa hari menjelang Lebaran hingga sesudahnya, kebutuhan BBM khususnya premium meningkat 10 hingga 12 persen.

Sekarang ini, konsumsi premium nasional mencapai 56.000 hingga 58.000 kiloliter per hari dan akan meningkat menjadi 65.000 hingga 70.000 kiloliter per hari. "Namun, kami sudah siapkan antipasinya kenaikan tersebut dengan menjaga stok yang tetap," tambahnya.

Hanung menambahkan, saat menjelang Lebaran, konsumsi BBM dan elpiji di wilayah Jabodetabek menurun drastis. Sementara daerah Jateng dan Jatim melonjak cukup tajam. Khusus elpiji, lanjutnya, pasokan di Jakarta bisa turun hingga 70 persen. Pada kondisi normal, kebutuhan elpiji 3 kg di Jakarta mencapai 800 ton per hari dan 12 kg 1.100 ton per hari.

Namun, konsumsi elpiji di Jateng dan Jatim sebaliknya mengalami kenaikan antara 10-12 persen. "Turunnya konsumsi BBM dan elpiji dikarenakan, banyak warga Jabodetabek yang mudik," katanya.

Secara keseluruhan,

diketahui stok BBM diperkuat Pengolahan (UP) IV Cilacap, Jawa Tengah yang produksinya kini kembali normal setelah pemeliharaan (turn around) kilang sudah berakhir 28 Agustus lalu. Kilang Cilacap memiliki kapasitas produksi terbesar di Indonesia yakni 348.000 barel per hari dan bernilai strategis karena memasok 34 persen kebutuhan BBM nasional atau 60 persen kebutuhan BBM di Pulau Jawa.

Dia juga menambahkan, Pertamina juga telah menyiapkan pasokan avtur yang cukup di lapangan-lapangan terbang yang menjadi bagian dari jalur mudik. "Kita akan membuka posko di kantor pusat dan seluruh wilayah pemasaran Pertamina pada H-10 hingga H+10," ucapnya.

Sebelumnya, Pertamina menyatakan, harga bahan bakar penerbangan jenis avtur terhutang 1 September 2008 mengalami penurunan sebesar 15 persen.

(A Choir)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input checked="" type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST
---	--

KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI	<input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> PANSUS ANGKET
---	---	---

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 16												TAHUN 2008																		

LNG TANGGUH Presiden Tak Berniat Putus Kontrak

JAKARTA (Suara Karya): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak berniat untuk memutus kontrak penjualan gas alam cair (*liquefied natural gas/LNG*) Lapangan Tangguh, Papua, ke Fujian, China.

Namun, komitmen pemerintah untuk memperoleh harga jual gas yang lebih baik dengan mengikuti perkembangan harga minyak tetap tidak akan berubah. Upaya renegosiasi harga gas Tangguh juga disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pejabat dan pengusaha dari Provinsi Guangdong, China, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (4/9).

"Presiden tadi juga menyinggung soal gas Tangguh. Intinya, kita ingin terus melangsungkan kerja sama penjualan LNG ke Fujian, namun ada perubahan situasi dan kita ingin itu dapat disesuaikan," kata Juru Bicara Kepresidenan Dino Pati Djalal.

Pejabat dari Guang-

dong pun berjanji akan menyampaikan niat Presiden itu kepada pihak yang berwenang, yakni dari Provinsi Fujian. "Mereka menanggapi karena provinsinya beda, maka ini nanti akan disampaikan pada pihak yang berwenang," ujar Dino.

Terkait rendahnya harga jual gas tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, ia siap memberikan penjelasan atas kontrak Tangguh tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan. "Saya siap kalau memang diminta. Kita kerja secara profesional, ini hasil tender dan sudah diperbaiki oleh pemerintahan sekarang," ujarnya.

Purnomo juga sempat menyatakan siap mundur jika memang diminta Presiden. Menurut dia, seluruh proses negosiasi hingga penandatanganan kontrak Tangguh dilakukan secara transparan dan profesional. "Harga ke Fujian mengacu hasil tender Guangdong yang kita ikuti, tapi kalah," katanya.

Harga kontrak LNG ke Fujian sebesar 2,4 dolar AS per juta kaki kubik (*mile mile British thermal unit/MMBTU*) sudah sesuai pasar tahun 2002. Bahkan, saat itu, Qatar pernah menjual LNG hanya 1,5 dolar AS per MMBTU. Demikian pula, pemakaian batas atas kontrak Fujian dikarenakan harga ditentukan pembeli dan saat itu semua memakai patokan batas atas.

Purnomo mengatakan, semua pihak mesti memahami sejarah kontrak dan permasalahan yang terjadi waktu itu. "Jangan mengatakan, ini salah, itu salah. Mesti dipahami dulu apa yang sesungguhnya terjadi di Tangguh," ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Menko Perekonomian/Menkeu Sri Mulyani Indrawati menilai, renegosiasi terhadap kontrak LGN Tangguh dengan pemerintah China karena Indonesia punya banyak alasan untuk mengubah kontrak tersebut. (A Choir)

30

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 7

TAHUN 2008



PERTAMAX TURUN – Pekerja menanti konsumen di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (1/9). Sesuai Surat Keputusan Direktur Pemasaran dan Niaga No Kpts-151/F00000/2008-S0 tertanggal 27 Agustus 2008, PT Pertamina (persero) kembali menurunkan harga bahan bakar khusus (Pertamax, Dex, Biopertamax) dengan variasi mulai Rp 400-550.

(AntiFanny Octavianus)

39

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 15

TAHUN 2008

Presiden: Teruskan LNG Tangguh

Pemerintah RI Ingin Perbaikan Kontrak

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk tetap meneruskan kontrak penjualan gas ke Fujian, China, meskipun kontraknya saat ini dinilai merugikan. Namun, Pemerintah Indonesia menginginkan perbaikan yang sesuai dengan situasi saat ini.

Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal mengemukakan, penegasan Presiden itu disampaikan kepada Sekretaris Partai Komunis China Wang Yang yang bertemu dengan Presiden di Kantor Presiden, Kamis (4/9).

"Dalam pembicaraan, Presiden juga menyinggung mengenai masalah Tangguh. Disampaikan bahwa kita (Indonesia) ingin terus melakukan kerja sama penjualan LNG ke Fujian, China. Namun, kita mencatat adanya perubahan situasi dan kita ingin agar dapat disesuaikan harga penjualan minyak kita ke China," ujar Dino.

Pembicaraan ini diangkat Presiden melanjutkan pembicaraan antara Wapres Jusuf Kalla dan Wapres China Xi Jinping tentang

negosiasi ulang kontrak LNG Tangguh.

Duta Besar RI untuk China Sudrajat, yang ditemui di Kantor Presiden, mengemukakan belum ada langkah lanjutan negosiasi setelah pembicaraan antar-wapres. "Semua masih dalam pembicaraan. Belum ada jadwal pertemuan tim. Yang penting pintu negosiasi sudah dibuka dan itu akan dipakai," ujarnya.

Lebih murah

Sebelumnya, saat memberikan keterangan kepada Panitia Angket BBM DPR, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution mengatakan, harga jual gas Tangguh lebih murah dibandingkan dengan harga jual gas kepada

konsumen domestik.

Dengan adanya batas atas harga minyak 38 dollar AS sebagai patokan, harga gas Tangguh yang dijual ke Fujian maksimal hanya 3,35 dollar AS per *million metric British thermal unit* (MMBTU).

Jika dibandingkan, harga jual gas ke masyarakat saat ini sebesar 9,9-12,22 dollar AS per MMBTU. "Memang belum terjadi kerugian negara karena belum ada pengiriman, tetapi mumpung pengiriman itu belum terjadi kita perbaiki, terutama patokan batas harga minyak itu," ujar Anwar.

Berdasarkan data BPK, pada tahun yang sama dengan penandatanganan kontrak Tangguh, sejumlah negara juga menekan kontrak penjualan gas yang menggunakan batas atas dan bawah harga minyak.

Negara-negara itu, antara lain, adalah Qatar untuk pasokan ke India dan Taiwan, Rusia untuk pasokan ke Korea, dan Australia untuk pasokan ke China. Patokan harga minyak yang digunakan sebesar 12-26 dollar AS per barrel.

(INU/DOT)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST	
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI	<input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> PANSUS ANGKET
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN: 2 TAHUN 2008		

Intervensi Asing di Sektor Energi Terkuak

IBRD Kucurkan 420 Juta Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS — Adanya intervensi asing dalam pengelolaan energi nasional terus terkuak dalam pemanggilan saksi-saksi oleh Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat.

Ichsanuddin Noorsy, sebagai saksi ahli di Panitia Angket, Kamis (4/9), menunjukkan sejumlah dokumen yang semakin menguatkan adanya intervensi asing tersebut.

Dokumen itu, antara lain, semacam radiogram (*teletex*) dari Washington kepada Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia J Stapleton Roy untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan seperti tertulis di dokumen itu.

Dalam dokumen tersebut, antara lain, tertulis: naskah RUU Minyak dan Gas diharapkan dikaji ulang parlemen Indonesia pada bulan Januari. Dokumen itu dikategorikan *confidential* yang

ditindih cap *unclassified*.

Ichsanuddin juga menyerahkan dokumen laporan Bank Dunia berjudul *Proyek Energi Indonesia* yang disiapkan 17 November 2000. Dalam dokumen itu tertulis nilai proyek 730 juta dollar AS. Sebanyak 310 juta dollar AS merupakan dana pemerintah dan 420 juta dollar AS di antaranya dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).

Sebelumnya, Panitia Angket juga mendapatkan data bahwa USAID, lembaga swadaya AS, mengucurkan dana 21 juta dollar AS untuk asistensi revisi UU Migas. "Diliberalkannya industri migas

itu, selain tertuang di *letter of intent*, juga tertuang di ADB (Bank Pembangunan Asia), USAID, dan Bank Dunia," ucap Ichsanuddin.

Menurut Ichsanuddin, yang paling diuntungkan dari adanya liberalisasi migas adalah kartel industri migas.

Panitia Angket menyambut gembira adanya dokumen-dokumen tersebut. "Dokumen dan penjelasannya luar biasa," ucap Effendy Choirie dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Eva Kusuma Sundari dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahkan mengaku sangat kaget dengan adanya dokumen-dokumen tersebut.

Menurut Dradjad Wibowo dari Fraksi Partai Amanat Nasional, dokumen-dokumen ini semakin mengindikasikan kuat bahwa pembuatan UU Migas sarat intervensi asing.

Panggil pejabat terkait

Untuk menelusuri sejauh mana intervensi asing ini memengaruhi pengambil kebijakan, Ichsanuddin merekomendasikan Panitia Angket memanggil semua pejabat yang terkait.

"Yang mestinya dipanggil, misalnya, Purnomo (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral). Bagaimana undang-undang itu dibuat? Bagaimana Purnomo menggagas pencabutan subsidi yang ternyata cocok dengan dokumen tadi yang memerintahkan pencabutan subsidi?" kata Ichsanuddin.

Ia juga menyinggung Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 yang mengatakan subsidi harus dikurangi bertahap.

"Panggil juga Bappenas, Sri Mulyani kenapa menggagas pencabutan subsidi?" ujarnya. (SUT)

91

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 25

TAHUN 2008

Konversi Minyak Tanah di Jabar Tuntas Akhir Tahun

Konversi bahan bakar minyak tanah ke elpiji di wilayah Jawa Barat ditargetkan tuntas akhir tahun ini. Dengan demikian, semua kota dan kabupaten di Jawa Barat tidak akan lagi mendapatkan pasokan minyak tanah bersubsidi mulai 2009. Hal itu dikatakan Kepala Divisi Komunikasi PT Pertamina (Persero) Wisnuntoro di sela-sela kegiatan karya bakti Kostrad Darma Putra dan Pertamina di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Kamis (4/9). Menurut Wisnuntoro, pengalihan minyak tanah ke elpiji di wilayah Jabodetabek sudah tuntas pada pertengahan Agustus. Di tempat terpisah, Badan Pusat Statistik Kota Bekasi menyatakan, kenaikan harga elpiji pada pekan terakhir Agustus lalu memberi andil besar terhadap inflasi di Kota Bekasi dan Jawa Barat. Secara persentase, kata Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS Kota Bekasi Ign Wibatsu Bharoto, elpiji yang termasuk dalam kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar menyumbang 0,13 persen pada pertumbuhan inflasi Jawa Barat sebesar 0,57 persen selama Agustus. (COK)



HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 22

TAHUN 2008

Antre Mengisi Elpiji



KOMPAS/BONY ARIYANTO NUGROHO

Sejumlah mobil pengangkut tabung kosong elpiji 3 kilogram antre untuk mengisi ulang di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Cimahi, Leuwigajah, Jawa Barat, Kamis (4/9). Beberapa sopir antre sejak Senin lalu untuk mendapatkan jatah isi ulang elpiji 3 kg. Permintaan elpiji jenis ini meningkat setelah minyak tanah bersubsidi ditarik dari pasaran dan peningkatan konsumsi bahan bakar saat bulan puasa dan menjelang Lebaran.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 111

TAHUN 2008

Oil prices rise before U.S. data

Agence France-Presse
London

Oil prices rose slightly on Thursday as markets awaited the latest weekly snapshot of U.S. energy inventories.

New York's main contract, light sweet crude for delivery in October, climbed 65 U.S. cents to U.S.\$110.97 a barrel.

Brent North Sea crude for October gained 37 U.S. cents to \$108.43.

Prices rose even though most U.S. crude oil production in the Gulf of Mexico remained off-line after refinery outages caused by Hurricane Gustav.

The hurricane's limited damage to U.S. energy facili-

ties had earlier in the week provided a huge relief and allowed prices to fall sharply, traders said.

"Oil prices retained a soft leaning ... It appears that Hurricane Gustav did little long-term damage to oil industry infrastructure," said David Moore, a commodity strategist with the Commonwealth Bank of Australia.

The tally of post-Gustav damage to oil and natural gas installations was still underway but the first oil production trickled back on-line.

Traders were awaiting the release of the U.S. government's weekly energy inventory report which will also provide clues on the state of U.S. crude demand.

Analysts are forecasting crude stocks fell by 300,000 barrels last week and that distillate inventories, which include heating fuel, rose by 600,000 barrels, according to Dow Jones Newswires.

Distillates are becoming a focus of attention for the market ahead of the northern hemisphere winter.

The report was due a day later than usual because of Monday's Labor Day holiday in the United States.

"Obviously, demand concerns are outweighing almost every other consideration," said John Kilduff, an analyst at MF Global.

Oil prices have plunged from record highs of more than \$147 in early July because of

weakening demand, especially in the United States, the world's biggest energy consuming nation.

The oil market was also looking ahead to Tuesday's meeting of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) amid speculation OPEC could cut output if prices hit \$100 or below.

On Wednesday, the U.S. Department of the Interior said 95.8 percent of oil production and 91.6 percent of natural gas production in the Gulf of Mexico remained cut.

Normal production in the region is 1.3 million barrels of crude a day and 210 million cubic meters of natural gas, according to the department.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 13

TAHUN 2008

Chevron wins RI's first deep-water gas project

Alfian
The Jakarta Post/Jakarta

U.S.-based energy giant Chevron Corp. has been approved by the Indonesian government to develop gas reserves in five deep-water fields off East Kalimantan at a projected total cost of US\$6.97 billion.

"The government has approved the POD (plan of development) and the company may now start operations," director general for oil and gas at the Energy and Mineral Resources Ministry Evita H.

Legowo said Thursday.

Energy and Mineral Resources Minister Purnomo Yudiantoro signed the approval on Aug 29, a media statement from the ministry shows.

Three of the fields — Gandang, Gendalo, and Maha — lie in a concession of Chevron Ganal Ltd., while the remaining two — Ranggas and Gehem — lie in a concession of Chevron Rapak Ltd.

According to Bloomberg, the entire venture may pump a maximum of close to one billion cubic feet of gas a day, or equivalent to 13 percent of

Indonesia's current output.

"This will be the country's first deep-sea drilling project," said Edy Hermantoro, upstream director at the ministry, adding that parts of the field lay in concession areas operated separately by Chevron and Rome-based Eni Spa.

Therefore, the POD in the area will integrate and involve both companies, he said.

Edy said Chevron and Eni may spend \$6.97 billion on the project, of which \$2.19 billion may be spent on developing wells and the rest on the con-

struction of a floating processing unit and other facilities, Bloomberg reported.

The project will increase gas supply to a liquefied natural gas (LNG) plant in Bontang in East Kalimantan Province, which will export 75 percent of its production and sell the rest domestically, Edy said.

Chevron's corporate communications manager, Santi Manuhutu, said the company had not officially received a letter of approval.

"Chevron is waiting for the official government approval of the deepwater gas project,"

she said in a statement sent via e mail.

The amount of time needed to develop the fields will be dependent on government approvals, market conditions and the achievement of key project milestones, she added.

Chevron holds an 80 percent operated interest in Gehem and Gendalo fields, she said.

According to Bloomberg, Chevron's Indonesia unit will require six to eight years to develop the fields before production can begin. Thus, production may start between 2014 and 2016.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> KORAN KONTAN <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input checked="" type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST	
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI	<input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> PANSUS ANGKET
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 2		TAHUN 2008

Coalition between Golkar and the PDI-P? Not likely

Pandaya

~ *The Jakarta Post/Jakarta*

The top leaders of the country's two largest political parties, Golkar and the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), have been floating yet again the idea of a coalition, returning their legendary love-hate relationship to the spotlight.

The two secular organizations have similar political platforms and the behaviors of the two parties' elites are also similar.

Taufik Kiemas, chief of the PDI-P advisory board, and Golkar chairman Jusuf Kalla raised the issue during a Golkar consolidation meeting in Jakarta on Aug. 25.

Kalla is a successful businessman and Kiemas has also been active in business including when his wife, Megawati

Soekarnoputri, was vice president from October 1999 to July 2001 and then president from July 2001 to September 2004.

"If the (Golkar and PDI-P) parties coalesce, the whole nation will remain united," Kalla said of the urgent need for the countries' largest parties to come together as one in next year's elections.

Taufik responded, "I hope the coalition will materialize before the PDI-P convenes its national meeting this November."

On the surface, the two political leaders' statements sound soothing amid the hustle-bustle in the national political scene, where politicians jostle for positions ahead of the elections.

Both Megawati and Kalla, the incumbent vice president, are set to compete for the presidency. Various pollsters have

tipped Megawati as the strongest candidate alongside Susilo Bambang Yudhoyono, who is keen to seek reelection.

In fact Golkar and the PDI-P, along with smaller nationalist parties, did form a coalition in 2004 when they joined forces to support the rise of Yudhoyono. Once they had their power share, they went their separate ways as foes again with the PDI-P assuming the role of opposition.

At the local level, they have joined forces in regency and provincial elections, in which many of their candidates suffered a shocking defeat at the hands of rivals fielded by an alliance of smaller but better-organized parties, spearheaded by the Islamic-oriented Prosperous Justice Party (PKS).

For Golkar and the PDI-P to form a coalition ahead of the 2009 elections — or even after

COMMENTARY

them — is unlikely, not only because Megawati and Kalla have their own presidential ambitions but also because the notion is meeting resistance from within the parties.

Kalla says he loves the coalition idea but would like to see it materialize after the 2009 legislative elections, suggesting that he wants to see the outcomes of the vote first. If Golkar manages to retain its majority in the House of Representatives, he would most likely run for the presidency but if the PDI-P fares better, he would probably not mind playing second fiddle again.

He is obviously upbeat about Golkar winning the legislative election. Political analyst Ari Dwipayana of Gadjah Mada University told Antara

that Kalla would feel comfortable enough to run for president if Golkar won just 30 percent of the 550 legislative seats. If that is the case, Kalla may offer the deputy position to Megawati, or the PDI-P would remain an opposition party if she refuses it.

Megawati is determined to run only for president — take it or leave it. PDI-P secretary-general Pramono Anung has made it clear it would be unthinkable for the party to build a coalition with any party that fields its own presidential nominee.

Adding to the complexity is the bitter political animosity between Megawati and Kalla. Late last month, Kalla waved a red flag at the bull when he ordered a review of an LNG contract with China signed by the Megawati administration in 2002. Kalla, who sees the

contract as considerably undervalued, believes it could incur a potential loss of Rp 700 trillion for Indonesia. The government has assigned a team led by Coordinating Minister for the Economy Sri Mulyani Indrawati to renegotiate the contract.

Megawati has retorted that Kalla's move is politically motivated and pointed out that both Kalla (then coordinating minister for the people's welfare in her Cabinet) and Yudhoyono (then her coordinating minister for political affairs, law and security) knew of the drafting of the disputed agreement.

Megawati apparently still cannot forgive Yudhoyono and Kalla for leaving her Cabinet and challenging her (successfully) in the 2004 presidential election.

Kalla's move has angered Megawati's men. PDI-P deputy

chief Tjahjo Kumolo has threatened to retaliate by disclosing incidents of major corruption involving government officials such as those allegedly taking place in Bank Mandiri, Karaha Bodas, the toll road projects and Chandra Asri.

At the grassroots level, many supporters of the PDI-P, which portrays itself as the "party of the common people", hold bitter memories of Golkar, which they see as the party of the late strongman Soeharto who oppressed them.

Like those numerous coalitions in the past, one between PDI-P and Golkar — if it happens at all — would be temporary and pragmatic: to rake in as many votes as possible and to share power.

These two parties, like so many others, are fighting for their own interests rather than doing what is best for the people.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

MB-7-10 (0)

- KODE: LISTRIK MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI UMUM
 MIGAS GEOLOGI PANSUS ANGKET
 ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 10

TAHUN 2008

Korsel Ingin Jadi Pusat
Penyimpanan Minyak Asia



Korea Selatan Kamis meluncurkan proyek ambisius untuk menjadi pusat penyimpanan minyak Asia Tenggara.

Para pejabat Korsel mengatakan akan menciptakan berbagai kesempatan bisnis baru dan menjamin ketersediaan energi.

Kontrak usaha patungan telah ditandatangani oleh perusahaan minyak milik pemerintah, Korea National Oil Corp.

(KNOC), pengilang lokal SK Energy, GS-Caltex, Oiltanking Asia Pacific dan Glencore Singapore, kata para pejabat.

KNOC sepakat memiliki saham 29 persen dalam usaha patungan tersebut dan akan berinvestasi US\$ 320 juta untuk meningkatkan penyimpanan di selatan pelabuhan Yeosu menjadi 6 juta barel pada 2011.

Korsel, Jepang, China dan Taiwan menyumbang sekitar 19% konsumsi minyak mentah dunia.

CD

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 20

TAHUN 2008

Lifting Migas Jadi Prioritas BPK Sudah Siap Audit

Jakarta, Probisnis RM.

DPR mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk secepatnya melakukan audit terkait produksi *lifting* minyak dan gas, ekspor-impor, *cost recovery* dan kebijakan produksi dan penjualan migas. Diduga praktik penyimpangan dalam kebijakan migas cukup besar.

"Saya sudah memerintahkan BPK secepatnya melakukan audit, dan BPK menyatakan siap," kata anggota Pansus BBM Drajad H Wibowo kepada *Probisnis* di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan, untuk audit produksi migas, BPK akan melakukan pemeriksaan terhadap kewajaran produksi dan *lifting* migas, kehandalan sistem pengendalian intern dalam produksi sampai *lifting* dan menilai pencapaian pengembangan produksi para KKKS.

"Hal ini dikarenakan modus yang dipakai para KKKS selama ini hanya menurunkan *lifting* dan menaikkan biaya," ujarnya.

Sedangkan untuk masalah audit ekspor dan impor migas akan difokuskan pada penilaian kewajaran pengadaan *crude* untuk produksi BBM, termasuk kewajaran harga dan proses pengadaan dan menilai kewajaran jumlah *crude entitlement* pemerintah yang tidak dijual atau diproses di kilang Pertamina, termasuk penetapan harganya ke penjual.

Mengenai *cost recovery*, akan ditekankan pada tujuan menilai kewajaran pembebanan *cost recovery* para KKKS, kewajaran perhitungan bagi hasil dengan KKKS. Drajad berharap setelah Idul Fitri nanti, audit BPK ini sudah rampung. Sehingga, praktik kejahatan perminyakan bisa secepatnya diungkap. ■ FIK

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 2

TAHUN 2008

Foke: Emang Bongkar SPBU Itu Bisa Ditiup?

GUBERNUR DKI Jakarta, Fauzi Bowo memastikan, tidak ada unsur tebang pilih dalam batalnya pembongkaran 27 SPBU yang berada di jalur hijau. Hal ini semata-mata ditunda karena kurangnya anggaran dalam APBD 2008. "Semua yang melanggar ketentuan pasti akan kita bongkar. Namun untuk masalah waktu harus disesuaikan dengan ketersediaan dana," ujar Fauzi di Balai kota, Rabu (3/9).

Menurut Fauzi, pembongkaran SPBU membutuhkan dana yang cukup besar. "Anggaran untuk melakukan pembongkaran sebenarnya telah masukan dalam APBD. Namun karena ada prioritas yang lain, alokasi tersebut kemudian dihilangkan," jelas pria yang akrab dipanggil Foke itu. Gubernur menyatakan ingin sekali segera membongkar 27 SPBU tersebut. "Tapi jika dananya tidak ada, kita mau bongkar bagaimana. Emang membongkar SPBU itu bisa ditiup?" tukasnya. Karena itu, sambung Foke, Pemprov DKI akan memasukan kembali anggaran tersebut pada APBD 2009.

Disinggung masalah belum terpenuhinya target pemenuhan

ruang terbuka hijau (RTH), yang salah satu sebabnya karena batalnya pembongkaran 27 SPBU, Foke mengatakan pembongkaran itu bukan urusannya. "Yang menjadi konsentrasi gubernur adalah terus menambah RTH sejauh kemampuan yang ada. Dan saya tidak akan mengurangi RTH yang ada," tuturnya. Yang dimaksud mengurangi Foke adalah mengurangi ketentuan peruntukan lahan yang ada. "Yang diperuntukan sebagai RTH akan dibangun RTH, tapi untuk yang bukan, akan dibangun sesuai dengan peruntukannya," pungkasnya.

Secara terpisah, Kepada Dinas Pertamanan DKI Jakarta, Eri Basworo mengatakan SPBU yang ada di jalur hijau seluruhnya berjumlah 32. Di tahun 2007 telah dilakukan pembongkaran dua SPBU. Jadi, kata Eri, saat ini ada 30 SPBU yang belum dibongkar. "Untuk tahun 2008 kita telah terima anggaran untuk membongkar satu SPBU yang berada di Jalan Hayam Wuruk. Namum, pemilik SPBU tersebut mengklaim bahwa lahan itu miliknya. Karena itu, kemudian terjadi sengketa dan di-PTUN-

kan. Karena masih di pengadilan, kami tidak bisa melakukan pembongkaran," ujar Eri kepada *Rakyat Merdeka*, Rabu malam (3/9).

Adapun untuk SBPU yang lain, sambung Eri, anggarannya tidak ada. Selain itu, jelasnya, dalam pembongkaran SPBU itu ada dua masalah. "Yaitu masalah kepemilikan dan masalah peruntukan. Jadi, walaupun peruntukannya untuk RTH, jika kepemilikannya bukan milik pemprov, maka harus dibebaskan dulu," jelasnya.

Selain di Hayam Wuruk, lanjut Eri, ada dua SPBU lain yang saat ini mengajukan surat kepemilikan. SPBU tersebut adalah yang terletak di Jalan Gereja Krisia dan Yos Sudarso. Sedangkan 27 SPBU sisanya masih dalam proses penyelidikan. "Takutnya, mereka juga memiliki surat kepemilikan dan izin. Soalnya SPBU tersebut sudah berdiri cukup lama dan sulit ditelusuri kepemilikan lahannya," tutur Eri.

Ditanya besaran anggaran untuk pembongkaran, Eri tidak menyebut secara detil. Yang jelas katanya, tidak butuh banyak. "Anggarannya ada tiga, yaitu pembebasan, pembongkaran dan pembangunan RTH," jelasnya. ■ USU

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 41

TAHUN 2008

Hendrasmo

Direktur Komunikasi LSI

Megawati Harus Legowo

DIREKTUR Komunikasi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Hendrasmo mengatakan, isu LNG Tangguh janganlah dimaknai sebagai bentuk kampanye hitam untuk menjatuhkan popularitas dan integritas Mega. LNG Tangguh, kata dia, harus dimaknai sebagai kampanye menyerang sebagai bentuk kritik dan evaluasi terhadap kebijakan dan tindakan politik yang pernah dilakukan oleh Mega saat menjadi presiden.

"Mega harus legowo menerima kritik dan evaluasi terhadap kontrak kerjasama LNG Tangguh. Biar bagaimanapun kontrak kerja sama ini memang dibuat pada masa pemerintahannya," kata Hendrasmo kepada *Rakyat Merdeka* di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan, isu kampanye yang dihembuskan tidak menyerang secara personal, sah-sah saja. Tentu, kata dia, sepanjang isu kampanye tersebut didukung oleh argumentasi dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. "Dengan begitu, publik jadi tahu *track record* dari kandidat capres yang akan dipilihnya. Biar semua transparan, publik tahu plus minus capres yang akan dipilihnya," tandas dia.

Lebih lanjut, kata Hendrasmo,



kampanye menyerang tidaklah melanggar moral dan etika politik. Kampanye menyerang, kata dia, sangat berguna bagi pendewasaan berdemokrasi di Indonesia. Kendati begitu, dia mengakui, budaya politik Indonesia masih menabukan kampanye saling serang.

"Agar berjalan *fair*, kampanye menyerang harus dibarengi oleh kedewasaan dari para politisi. Politisi yang menyebarkan isu harus berani bertanggungjawab, paling tidak mengakui perbuatannya menyebarkan isu.

Kemudian, kalau di sudah berani mengaku tinggal dituntut untuk memberikan bukti-bukti pendukung, agar isu tersebut tidak menjadi fitnah atau kampanye hitam," tukasnya. ■ MRA

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 4

TAHUN 2008

Agung Laksono
Wakil Ketua DPP Partai Golkar

Kalau Buruk, Katakanlah Buruk

WAKIL Ketua DPP Partai Golkar Agung Laksono menyambut baik keinginan PDIP untuk melakukan debat terbuka tentang LNG Tangguh. Dia mengatakan, sebelum tantangan PDIP dilontarkan, ketua umum Golkar Jusuf Kalla sudah berbicara lebih dulu di televisi tentang kontrak LNG Tangguh yang bermasalah.

Agung menilai, tuntutan agar Megawati bertanggung jawab atas kontrak kerjasama LNG Tangguh adalah pandangan partai. Dia mengatakan, isu LNG Tangguh harus disikapi secara positif dan jangan disikapi dengan menyebarkan isu-isu untuk saling menjatuhkan.

"Kalau memang kontrak itu buruk katakanlah buruk, begitupun kalau baik, kami berusaha untuk seobyektif mungkin. Jangan mengancam untuk buka-bukaanlah, secara proporsional saja menanggapi isu tersebut. Jangan sampai kita saling menghancurkan," tandasnya.

Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan, dalam waktu dekat ini Presiden SBY akan memanggil Menteri ESDM Purnomo Yusgian-

toro untuk dimintai keterangan terkait keterlibatannya dalam merancang kontrak kerjasama LNG Tangguh ke Fujian China. Namun, kata dia, pemanggilan tersebut jangan dulu diartikan bahwa Menteri Purnomo akan dinonaktifkan sebagai menteri.

"Kita tidak boleh terburu-buru, Purnomo harus terlebih dulu ditanyakan peran sertanya dalam rancangan kontrak kerjasama LNG Tangguh. Jika memang ada indikasi bahwa peran dia besar, maka pasti kami akan menuntut dia untuk mempertanggungjawabkannya," ujarnya Syarif kepada *Rakyat Merdeka*, di Jakarta, kemarin.

Ditanya mengenai renegotiasi Tangguh 2006 lalu yang hanya merevisi harga, dia mengatakan, pemerintah sangat menghargai kontrak, sehingga hanya bisa melakukan renegotiasi sebatas revisi harga.

"Kalau langsung putus kontrak, ke depannya kepercayaan masyarakat internasional kepada Indonesia akan turun. Padahal saat ini kita membutuhkan kepercayaan asing untuk berinvestasi," tandasnya. ■ MRA

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 4

TAHUN 2008

"Orang-orang Mega Sibuk Membela"

POLITISI PDIP ramai-ramai membela bosnya, Megawati Soekarnoputri karena 'diserang' kasus LNG Tangguh. Isu LNG Tangguh dianggap sebagai kampanye hitam menjelang pemilihan presiden 2009.

Ganjar Pranowo, misalnya, justru menunjuk 'keterlibatan' Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, karena sewaktu kerja sama LNG Tangguh, keduanya sebagai menteri Megawati. "Jadi mustahil, mereka tidak mengetahui kontrak kerjasama tersebut sebelumnya," ujar Ganjar kepada *Rakyat Merdeka* di Gedung MPR/DPR, Senayan.

Dia mengatakan, dihembuskannya isu LNG Tangguh saat ini lantaran pemerintah gagal dalam melakukan konversi minyak tanah ke gas, dimana saat ini gas menjadi barang langka dan mahal. Akibat kegagalan itu, kata dia, pemerintah mencari kambing hitam dan dihembuskanlah isu LNG Tangguh.

"Selain itu, ini juga karena popularitas kepemimpinan SBY-

JK di mata publik semakin turun. Sedangkan popularitas Megawati naik. Jadi, bukan kami yang kebakaran jenggot, tapi pemerintah," tandasnya.

Menurut dia, kendati berbagai media ramai memberitakan bahwa Mega yang paling bertanggungjawab atas kontrak kerja sama LNG Tangguh tidak berpengaruh terhadap popularitas Mega.

Dia mengaku, bahwa banyak pesan singkat yang diterimanya dari konstituen di daerah justru semakin simpatik terhadap Mega. "Rakyat sudah semakin cerdas, mereka bisa membaca permainan politik apa yang sedang dilakukan oleh pesaing Mega," tukasnya.

Sementara itu, politisi PDIP lainnya, Eva Sundari mengatakan, kontrak kerja sama LNG Tangguh merupakan kontrak terbaik saat itu dan tidak sepatutnya dibandingkan dengan situasi saat ini. Dia mengatakan, jika oleh pemerintah sekarang dianggap sebagai kontrak kerjasama terburuk, seharusnya pada 2006

lalu kontrak kerja sama itu dibatalkan dengan alasan Cina melakukan wanprestasi karena ketidaksiapan gudang penyimpanan.

"Tapi kok cuma renegotiasi harga, dan itu tidak lebih dari satu dolar AS," ujar Eva kepada *Rakyat Merdeka*.

Eva menilai, digulingkannya isu LNG Tangguh saat ini bukanlah dengan maksud yang sesungguhnya untuk melakukan perbaikan terhadap kontrak kerjasama yang dinilai buruk, melainkan untuk membangun opini publik dalam rangka mendeskreditkan Megawati. "Ini wujud dari tidak adanya jiwa negarawan dari JK," tandasnya.

Dia menambahkan, untuk menghadapi serangan atas kasus LNG Tangguh, Fraksi PDIP dalam rapat internal, sepakat untuk melakukan debat terbuka kepada Wapres Jusuf Kalla. "Biar semua transparan, karena kami punya bukti-bukti dan argumentasi bahwa yang dilakukan oleh Ibu Mega adalah yang terbaik saat itu," tandas Eva. ■ MRA

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 1

TAHUN 2008

Soal Penjualan Gas Murah Ke Cina

Presiden Curhat Ke Petinggi Komunis

Jakarta, RM. Meskipun kontrak penjualan gas ke Fujian menuai kritik, pemerintah tetap akan melanjutkan kerjasama itu dengan pemerintah Cina. Keinginan tersebut disampaikan Presiden ketika menerima kunjungan kehormatan Sekjen Partai Komunis Guang Dong, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang juga anggota Polit Biro Komite Sentral, Wang Yang di kantor kepresidenan, kemarin.

Pertemuan kedua pemimpin itu dijadikan ajang curhat Presiden SBY kepada Wang Yang terkait renegosiasi penjualan gas Tangguh Indonesia ke Cina. "Presiden menyampaikan bahwa pemerintah ingin terus melakukan kerjasama penjualan gas. Namun karena ada perubahan situasi, kita ingin

agar dapat disesuaikan harga penjualannya," ujar Juru Bicara Kepresidenan, Dino Patti Djalal se usai menemani Presiden bertemu Wang Yang.

Di tempat terpisah, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan penjualan LNG sudah dilakukan secara profesional dan transparan sesuai ketentuan. "Saya bekerja secara profesional. Semua dilakukan secara terbuka dan transparan. Kalau memang LNG dipermasalahkan, saya siap dipanggil," kata Purnomo, kemarin.

Purnomo menceritakan, proyek LNG Tangguh sebelumnya sudah ditawarkan ke berbagai pihak, tapi selama 20 tahun tidak laku-laku. Padahal sudah

dinyatakan sebagai proyek nasional oleh pemerintah waktu itu. Akhirnya, hanya Cina yang mau membelinya.

Menurut dia, pemerintah sudah menegosiasikan ulang harga LNG tersebut sejak tahun 2006. Bahkan, prosesnya masih berlangsung hingga kini.

Menurut Dino, soal renegotiasi kontrak, Wapres Jusuf Kalla sudah bertemu dengan Wapres Cina. Dan kedua pihak sudah sepakat mendiskusikannya. Hal itu juga disampaikan Presiden SBY kepada Wang Yang.

Meskipun propinsinya berbeda, tapi Wang Yang juga anggota Polit Biro Komite Sentral. Menurut Dino, Wang Yang adalah Sekjen Partai Komunis

dari Guang Dong, bukan Fujian. Tetapi dia memiliki perhatian khusus untuk itu.

"Karena sudah ditangani pada di tingkat Wapres Cina, Presiden SBY tadi hanya menekankan kembali soal itu kepada Wang Yang," ungkapnya.

Saat ini, lanjut Dino, tugas pemerintah adalah membentuk tim negosiasi yang tangguh yang akan berunding dengan Cina untuk tahun ini. Ke depan, akan ditentukan tempat dan tanggal pertemuan dengan pihak Cina.

Di tempat terpisah, Masyarakat Papua mengaku merasa dilecehkan oleh bekas Presiden Megawati Soekarno-putri.

"Masyarakat Papua tidak mendapatkan keuntungan apapun dari LNG Tangguh, padahal pimpinan negara saat itu (Megawati, red) harusnya mengerti

bahwa kekayaan alam Papua dari gas Tangguh sangat besar. Pemimpin Negara yang menyetujui kontrak LNG Tangguh saat itu sama saja melecehkan masyarakat Papua, karena tidak memberikan keuntungan sama sekali," kata anggota Komisi I DPR, Yorris Roweyai di Jakarta, kemarin.

Anggota DPR dari Dapil Papua ini mengatakan, karena kontrak LNG Tangguh tidak menguntungkan, sehingga pemerintah SBY-JK harus segera melakukan perjanjian ulang.

"Kita mendukung renegotiasi kontrak LNG Tangguh. Kita juga mendukung keberanian pemimpin negara SBY-JK yang mau serius meninjau ulang perjanjian kerjasama dengan Cina ini. Keberanian SBY-JK diharapkan mengangkat kesejahteraan masyarakat Papua," katanya.

Tokoh masyarakat Papua yang juga Bupati Teluk Bintuni Alfons Manibui protes keras terkait kontrak LNG Tangguh. Dia menilai tindakan Megawati tidak pro rakyat Papua.

Selama proyek tersebut berjalan, masyarakat Papua tidak pernah diuntungkan. "Mereka tidak mendapatkan manfaat. SDA gas dan minyak yang kaya di Papua hanya menguntungkan pihak luar. Bahkan karyawan yang bekerja di LNG tangguh mayoritas datang dari luar," bilanginya.

Kata Alfons, pemerintah sebaiknya memutus kontrak jika tidak menguntungkan. "Kalau dijual ke Cina tidak menguntungkan lebih baik di jual di dalam negeri saja. Toh harga gas saat ini sangat tinggi, kalau dikelola dengan baik pasti bisa mendatangkan keuntungan," katanya. ■ WHY/FIK/SRF

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 61

TAHUN 2008

Kasus LNG Tangguh Harus Diusut Tuntas

Kurtubi: Menteri

Purnomo

Mestinya Tidak Ikut Tim

Kasus LNG Tangguh harus diselesaikan secara hukum, bukan politik. Pemerintah disarankan tidak mengikutsertakan Menteri Purnomo Yusgiantoro dalam renegosiasi.

KISRUH kasus LNG Tangguh saat ini lebih banyak diarahkan ke ranah politik, ketimbang hukum. Kandidat calon presiden 2009 mendomplengi kasus LNG Tangguh menjadi komoditas politik untuk saling menjatuhkan. Padahal, semestinya kasus ini diselesaikan secara hukum karena ada kerugian Negara.

Demikian diungkapkan Direktur *Center for Petroleum and Energy Economics Studies* (CPEES) Kurtubi dalam Jumpa Pers yang bertema "Usut Tuntas Skandal Kontrak LNG Tangguh!" di Gedung DPD, Jakarta. Dia mengatakan, semua orang yang terlibat harus segera di-

investigasi dan diselesaikan secara hukum. Penyelesaian secara politis, kata dia, tidak akan membuahkan hasil yang maksimal.

"Yang menjadi inisiator formula harga murah kontrak tangguh juga harus diketemukan. Proses secara hukum, jangan politis," tandas Kurtubi.

Dia menyarankan pemerintah untuk tidak melibatkan tim negosiasi kontrak kerjasama ke Cina yang lama. Soalnya, kata dia, jika tim lama diikutsertakan dalam tim renegosiasi, maka kredibilitas tim baru akan hancur. Pejabat yang terlibat dalam tim lama adalah Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Kardaya Warnika (Bekas Kepala BP Migas), dan Deputi Operasi BP Migas Eddy Purwanto.

"Pemerintah Cina akan bilang masak orang-orang yang dulu ikutan menggolkan kontrak lama, sekarang menolaknya. Ditakutkan juga kalau mereka ikut akan ada konflik kepentingan dalam tim," katanya.

Selain itu, kata Kurtubi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah pihak yang patut dipertanyakan keterlibatannya, terutama dalam

memberikan pendapat kepada ketua tim negosiasi Tangguh ke Cina terkait untung dan ruginya.

"Para pejabat tersebut tidak mempunyai visi masa depan, tidak belajar dari pengalaman sebelumnya tentang fluktuasi harga minyak dan gas, atau tidak belajar sama sekali dari kontrak LNG Badak," ujarnya.

Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Marwan Batubara mengatakan, yang bertanggung jawab dalam kasus LNG Tangguh seharusnya tidak hanya mantan presiden sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi, namun juga menteri, khususnya menteri ESDM dan jajaran pejabat terkait sebagai pelaksana operasional.

"Mau dipolitisasi atau tidak, bukan masalah. Yang penting, kontrak kerjasama tersebut dapat segera direnegosiasi, sehingga gas sebagai sumber daya alam bisa bermanfaat sebagai sumber kesejahteraan bagi rakyat," tandasnya.

Cegah Potensi Kerugian Negara
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) me-

ngemukakan, upaya negosiasi ulang kontrak gas Tangguh untuk Provinsi Fujian, China, dilakukan untuk mencegah potensi kerugian negara. Tim Negosiasi di bawah pengawasan Wakil Presiden Jusuf Kalla dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk upaya renegosiasi itu.

"Kalau tidak diperbaiki, akan besar sekali kerugian negara dibandingkan kontrak-kontrak gas lain seperti di Bontang dan Arun. Ini yang mesti diperjuangkan untuk dinegosiasikan. Niat renegosiasi agar negara tidak dirugikan," kata Presiden saat memberi pengantar rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/8) lalu.

Kontrak LNG Tangguh ditan-datangani pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Saat itu, SBY menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Kalla sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Tim negosiasi Tangguh saat itu, konon, dipimpin Taufik Kiemas, suami Megawati.

Nah, untuk negosiasi ulang,

55



LNG Tangguh.

Presiden SBY menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani membentuk tim yang kuat bersama tim teknis terkait. "Tim akan di bawah supervisi Wapres," ujar SBY.

Menimpali rencana renegotiasi kontrak LNG Tangguh, politisi PDIP Ganjar Pranowo mengatakan, kontrak kerjasama penjualan LNG Tangguh ke Cina masih bisa diperbaiki.

Dia mengatakan, kontrak kerja sama dapat diperbaharui setiap empat tahun. "Jika kemudian dinilai merugikan negara, dalam *review* empat tahunan itulah momen untuk memperbaiki kontrak tersebut," katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo meminta, Menteri ESDM Purnomo Yusi-giantoro angkat bicara. "Purnomo seharusnya bicara terbuka bagaimana proses negosiasi tersebut, siapa yang membuat klausul kontrak kerjasama LNG Tangguh, berapa harga gas dunia saat itu. Jangan hanya diam. Sehingga isu LNG ini tidak dipolitisir," ujar Tjahjo kepada *Rakyat Merdeka* dalam pesan singkat, kemarin.

Dia mengatakan, adalah hak pemerintah untuk melakukan negosiasi. Kontrak kerja sama LNG Tangguh adalah *Government to Government* (G to G). Lagipula, tambah dia, pengiriman gas per-

tama ke Cina baru akan dilakukan pada tahun 2009. Dia mengatakan akan mendukung pemerintah untuk melakukan renegotiasi.

"Ketika menjabat sebagai presiden, Megawati relatif bersih. Kontrak kerjasama tersebut dibahas dalam rapat kabinet terbatas dan rapat kabinet paripurna yang transparan. Justru dengan mempolitisasi LNG Tangguh terlihat bahwa saat ini pemerintah sedang panik.

Kalau memang pemerintah terus mempolitisasi LNG Tangguh, Fraksi PDIP akan membuka kebobrokan pemerintahan sekarang. Kita tunggu saja tanggal mainnya," pungkasnya. ■ MRA/WHY

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 (5) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN :

5

TAHUN 2008

Harga LNG Tangguh Didasarkan Kedekatan

JAKARTA (SINDO) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengaku penetapan harga penjualan gas (*liquefied natural gas/LNG*) Tangguh didasarkan pada kedekatan Pemerintah Indonesia dengan China. Sebab, menurut dia, LNG Tangguh pada dasarnya sudah tidak laku untuk dijual.

Karena itu, diperlukan kedekatan khusus untuk dapat menjual sumber daya alam tersebut. Menurut Purnomo, penjualan LNG Tangguh pada dasarnya bersifat "untung-untungan". Sebab, tidak ada lagi yang mau membeli kontrak tersebut selain China. "Tangguh itu sudah 20 tahun dan tidak pernah laku waktu itu. Jadi tolong dipahami

betulapa yang terjadi," papar Purnomo di Jakarta kemarin.

Dengan kedekatan itulah, ujar dia, Pemerintah Indonesia akhirnya berhasil menjualnya ke Fujian. Padahal, sebelumnya tender pasokan LNG Indonesia ditolak di Guangdong, China. Dia meminta semua pihak untuk memahami terlebih dulu terkait penjualan LNG Tangguh tersebut. Permasalahan LNG Tangguh, lanjut dia, merupakan permasalahan masa lalu sehingga tidak bisa saling melempar kesalahan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Pramono Anung mengatakan, saat kontrak penjualan LNG Tangguh ditandatangani pada 2002, harga LNG sedang rendah. Karena itu, tidaklah tepat jika dibandingkan dengan harga yang ada saat ini. "Saat itu, harga LNG sudah sangat baik mengingat formula harganya pun mulai beralih dari *seller market* ke *buyer market*. Artinya, para pembeli yang menentukan harganya karena produsen LNG sudah sangat banyak," papar Pramono.

(susi/ahmad baidowi)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 121

TAHUN 2008



PERTAMAX TURUN: Dua petugas sedang mengisi bahan bakar pertamax di SPBU Merak Jingga, Medan, kemarin. Harga pertamax turun dari Rp9.100 menjadi Rp8.650 per liter sejak 1 September lalu, menyusul terus turunnya harga minyak mentah dunia.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 12

TAHUN 2008

Skenario Besar Liberalisasi Energi

Ada skenario besar di balik liberalisasi sektor energi Indonesia? Pengamat sosial ekonomi, Ichsanudin Noorsy, menegaskan, "iya".

"Liberalisasi sektor migas itu perannya Bank Pembangunan Asia (ADB), USAID (lembaga donor dari Amerika Serikat), dan Bank Dunia. Bagaimana pemerintah diminta berhati-hati supaya bahan bakar minyak (BBM) publik dicabut subsidiya. Ini adalah skenario besar," kata Noorsy usai dipanggil Panitia Penyelidikan (Hak Angket) BBM DPR, Kamis (4/9).

Ada dua dokumen yang dibebaskan Ichsanudin soal keterlibatan asing. Pertama, surat yang mencantumkan nama Duta Besar AS untuk Indonesia, Stapleton Roy (1996-1999), terkait penyusunan Undang-Undang (UU) No 22/2001 tentang Migas dan liberalisasi sektor listrik.

Kedua, dokumen Bank Dunia terkait *Energy Sector Governance Strengthened* 497-013 pada 2000. Dalam dokumen itu, Bank Dunia menilai kebijakan energi pemerintah tidak tepat. Sebab, pemerintah menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk menyubsidi BBM, sedangkan sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial lainnya terbengkalai.

Bank Dunia menyarankan pemerintah meminimalisasi perannya sebagai regulator, memotong subsidi, dan meningkatkan peran serta swasta. Kalau menerapkan saran ini, Bank Dunia yakin pemerintah memperoleh keuntungan miliaran dolar AS dari sektor energi, terutama pajak. Selain harga yang makin rasional, dampak lingkungan yang minim dan mempertahankan sumber daya alam nasional.

Lembaga USAID berperan dalam memberi masukan-masukan pengembangan kebijakan itu, termasuk bagaimana menerapkan kebijakan kunci serta reformasi kebijakan dan aturan hukumnya. USAID juga membantu analisis harga energi dan pemotongan subsidi nasional serta dibukanya sektor listrik untuk swasta.

Dokumen yang sama menunjukkan USAID bergandeng tangan dengan erat bersama ADB dan Bank Dunia terkait reformasi dengan menggelontorkan dana 20 miliar dolar AS dalam bentuk utang. ADB dan USAID juga bekerja sama

membuat UU Migas yang baru saat itu. Malahan jangka waktu liberalisasi penuh sektor migas adalah Januari tahun depan.

Apa dampak liberalisasi ini bagi Indonesia? Ichsanudin mengatakan, "Nantinya akan ada kartel hulu migas oleh pemain asing," katanya. Pada akhirnya ini membuat hulu dan hilir sektor energi tak sesuai UUD 1945.

"Artinya, kita bersedia dikendalikan kekuatan pasar. Padahal APBN punya peran menstabilkan harga, menyejahterakan rakyat," katanya seraya menegaskan kenaikan harga BBM kemarin melanggar konstitusi.

Ia juga membandingkan dokumen Bank Dunia yang menyarankan agar pemerintah mencabut subsidi energi bertahap lima tahunan hingga dilepas ke harga pasar sepenuhnya. "Ini kan sama dengan yang diusulkan Kepala Bappenas, Paska Suzetta, harga BBM akan disesuaikan bertahap," sambungnya.

Anggota Panitia Angket, Tjatur, menilai paparkan Ichsanudin memberi wawasan tentang yang sebenarnya terjadi di balik liberalisasi sektor migas nasional. "Jiwa UU Migas itu sangat proekonomi pasar. Sektor energi kita masuk ke perangkat pasar hanya sebagai komoditas bukan jadi aspek penting pertahanan nasional," katanya.

Kewajiban pemerintah

Pengamat asal Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta itu juga mempermasalahkan istilah subsidi oleh pemerintah. Definisinya sekarang tidak jelas karena subsidi hanya diartikan sebagai selisih antara harga pasar dan harga jual pemerintah. Sementara dari kaca mata konstitusi, merupakan kewajiban pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya.

Untuk mengklarifikasi semua ini, ia mendukung pemanggilan sejumlah mantan menteri energi. Termasuk, Susilo Bambang Yudhoyono. "Ia tahu dan mengerti soal bagaimana sejarah pembuatan UU Migas." Nama lain yang diusulkan dipanggil adalah Meneg PPN/Kepala Bappenas Paska Suzetta, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, dan Menko Perekonomian Sri Mulyani. ■ evy

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 74

TAHUN 2008

Chevron dapat persetujuan garap gas di Selat Makassar

Oleh RUDI ARIFFIANTO
& FIRMAN HIDRANTO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Chevron telah mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia untuk menggarap lima lapangan kaya gas dari dua wilayah kerja laut dalam di Selat Makassar yang diperkirakan menghabiskan dana US\$6,97 miliar.

Proyek yang digarap itu meliputi Lapangan Gandang, unitisasi Lapangan Gendalo dan unitisasi Lapangan Maha pada Wilayah Kerja atau Blok Ganal dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) Chevron Ganal Ltd. dan Lapangan Ranggalas serta unitisasi Lapangan Gehem di Blok Rapak dengan KKKS Chevron Rapak Ltd.

Dirjen Minyak dan Gas bumi Departemen Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM)

Evita Herawati Legowo mengatakan PoD (*plan of development*) untuk kelima lapangan itu memang sudah disetujui oleh Menteri ESDM. "Ya kalau sudah disetujui mereka tinggal melakukan kegiatannya sesuai dengan PoD yang mereka ajukan," tuturnya kemarin.

Persetujuan PoD itu sendiri telah ditan-datangani pada 29 Agustus 2009 oleh Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro. Dengan penandatanganan PoD tersebut, lanjut Evita, Chevron bisa memulai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi gas di lapangan-lapangan tersebut.

Namun demikian, persetujuan PoD itu dengan ketentuan bahwa persetujuan PoD Pertama wilayah kerja Ganal, bukan merupakan komersialitas wilayah kerja Muara Bakau dengan KKKS ENI Muara Bakau B.V.

"Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan PoD Pertama, dapat dilaksanakan

secara terintegrasi, tetapi pembebanan wilayah wajib dilakukan pada setiap wilayah kerja.”

Dirjet Migas juga mensyaratkan KKKS Chevron Ganal dalam pengembangan Lapangan Gendalo dan Maha, bukan merupakan pengembangan Lapangan yang pertama pada wilayah kerja Selat Makassar, sehingga KKKS Chevron Makassar Strait Ltd. tidak mendapatkan *investment credit*.

Dalam rangka persetujuan itu, BP Migas juga diminta untuk melakukan pengawasan terutama terhadap penerapan keteknikan yang baik, pengembangan masyarakat setempat, dan penggunaan tenaga kerja (termasuk pihak ketiga).

Produk dalam negeri

Selain itu, Chevron diminta untuk menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri dan efisiensi biaya pengembangan dan biaya operasi, keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta kegiatan pascaoperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pemasaran gas dari kelima lapangan itu, Evita mengatakan seharusnya kontraktor terkait sudah mendapatkan komitmen pembelian dari konsumen. “Seharusnya mereka sudah punya [konsumen].”

Namun, Deputy Finansial, Ekonomi, dan Pemasaran Djoko Harsono mengaku belum mengetahui adanya komitmen penjualan gas milik Chevron di lapangan laut dalam pertama di Indonesia itu. “Saya belum mendengar ke mana mereka akan menjual gasnya.”

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) juga berminat untuk ikut dalam pengelolaan Blok Selat Makassar itu dengan berencana menguasai saham lebih dari 10%.

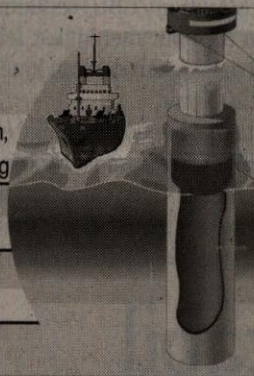
Ketika itu, Wadirut Pertamina Iin Arifin

Takhyan mengatakan pihaknya sedang dalam negosiasi dengan Chevron untuk memperoleh keikutsertaan (saham) di blok kaya gas itu.

Setidaknya, katanya, BUMN itu akan mengoptimalkan peluang penguasaan saham sekitar 10% berdasarkan *production sharing contract* (PSC) tentang keistimewaan Pertamina. (rudi.ariffianto@bisnis.co.id/firman.hidranto@bisnis.co.id)

Proyek gas laut dalam Selat Makassar

Lapangan	: Gendalo, Sapi, Gehem, Ranggas, dan Gandang
Cadangan	: 800 juta kaki kubik
Biaya per sumur	: US\$30 juta
Total biaya	: US\$6,97 miliar
Mulai dibor	: 2009
Mulai produksi	: 2016



Sumber : Dari berbagai sumber, diolah

BISNIS/FITRIYANA PULUNGAN



BISNIS/ABROR RIZKI

RENEGOSIASI HARGA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (*kanan*) berbincang dengan Sekretaris Partai Komunis Republik Rakyat China, Wang Yang, di Kantor Kepresidenan di Jakarta, kemarin. Presiden menyatakan Indonesia ingin terus melakukan kerja sama dalam penjualan LNG ke Fujian, China. Akan tetapi jika terdapat perubahan situasi, Pemerintah Indonesia berharap dapat dilakukan renegotiasi harga.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

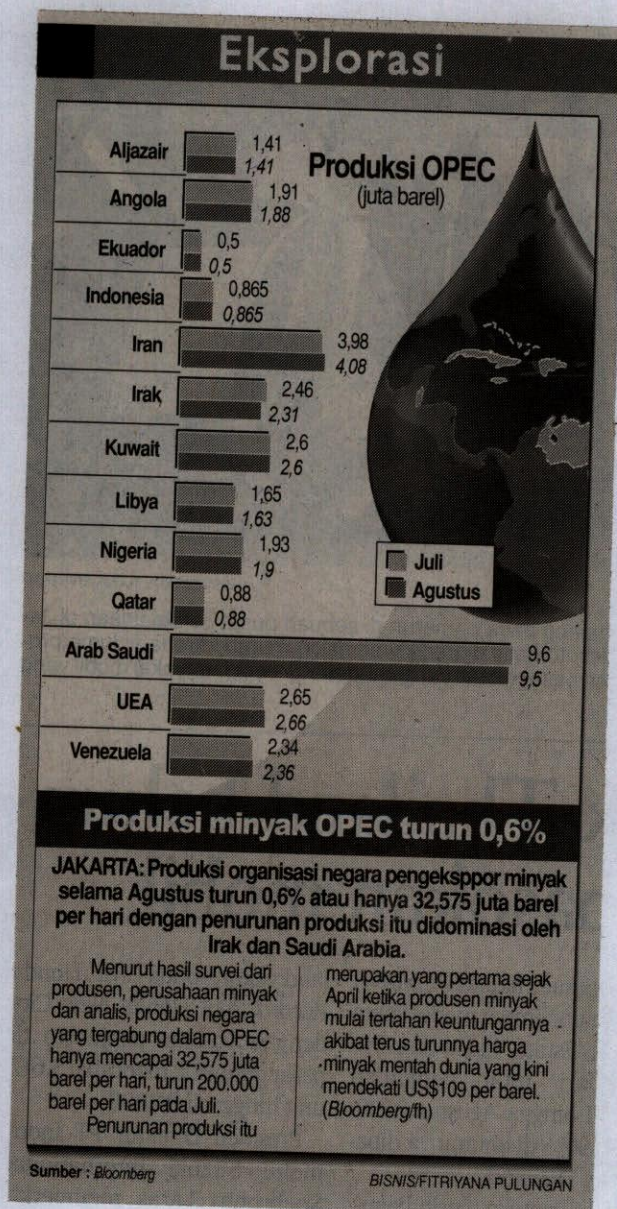
UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 141

TAHUN 2008



HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

ME-1-14-0

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 14

TAHUN 2008

Harga bensin Malaysia turun Oktober

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi menjanjikan akan memotong harga bensin awal Oktober apabila harga minyak mentah dunia tetap di level US\$109 per barel, atau lebih rendah lagi.

Pernyataan Badawi itu juga bagian dari upaya menarik simpati masyarakat di tengah-tengah turunnya popularitas pengganti Mahatir Muhammad itu dan meningkatnya tekanan oposisi di bawah pimpinan Anwar Ibrahim.

"Masyarakat membutuhkan bantuan di tengah krisis. Dengan adanya pemotongan harga bensin, dana itu bisa dialihkan untuk membeli bahan makanan," ujarnya kemarin. (BLOOMBERG/FH)

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 14

TAHUN 2008

Korsel bangun kilang 6 juta barel

SEOUL: Korea Selatan akan membangun sebuah fasilitas penyimpanan yang mampu menampung hingga 6 juta barel minyak dan produk-produk minyak lainnya di selatan pelabuhan Yeosu pada 2011.

Menurut Kementerian Energi Korsel, Perusahaan minyak nasional milik pemerintah, Korea National Oil Corp (KNOC), SK Energy, GS Caltex, Oiltanking and Glencore akan ambil bagian dalam proyek tersebut, kata kementerian itu lagi. KNOC sepakat memiliki saham 29% dalam usaha patungan tersebut. Investasi yang dibutuhkan US\$320 juta. (ANTARA/REUTERS)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 74

TAHUN 2008



BISNIS/RAHMATULLAH

HARGA ELPIJI: Seorang pekerja mengawasi pengisian gas elpiji 12 kg di stasiun pengisian milik Pertamina di Jakarta, belum lama ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui keputusan PT Pertamina menaikkan harga elpiji secara mendadak dan menjamin harga bahan bakar ukuran 12 kg menjadi Rp5.750 per kg, atau Rp69.000 per tabung tetap aman hingga 2009.

65

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> KORAN KONTAN <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST	
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI	<input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> PANSUS ANGKET
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN: 7		TAHUN 2008

Solusi konkret mengatasi krisis energi

Oleh ABDUL GHOPUR
Lembaga Kajian Implementasi & Tata kelola Energi Nasional
Energy Efficentrum

Dunia kini dilanda kebingungan akan krisis energi yang makin memprihatinkan di mana ketersediaan cadangan berbagai jenis energi mulai menipis, khususnya energi yang berbahan bakar minyak (BBM). Fakta cadangan minyak dunia hanya dapat digunakan sampai 30 tahun lagi, membuat semua stakeholder kebingungan.

Cadangan minyak dunia pada 2007 merosot hingga 200 juta barel, cadangan terbukti minyak dunia sekarang ini diperkirakan hanya 1,2 triliun barel sebagian besar ada di Timur Tengah. Diprediksikan, cadangan itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dunia selama 30 tahun ke depan.

Cadangan atau ketersediaan energi minyak Indonesia menunjukkan bahwa cadangan total minyak bumi yang meliputi cadangan terbukti dan cadangan potensial hanya sekitar 10 miliar barel. Cadangan minyak hanya akan mampu bertahan 10 hingga 15 tahun ke depan.

Sementara itu, produksi minyak dalam negeri pada 2007 saja hanya

mencapai 969.000 bph dan target APBN-P 2008 produksi minyak nasional sebesar 927.000 bph. Konsumsi minyak pada 2008 mencapai 1.157.000 bph dan konsumsi energi secara nasional meningkat pesat (boros) dengan pertumbuhan rata-rata 10% per tahun. Selain itu, sebagian besar masyarakat sangat bergantung pada konsumsi energi yang berbahan bakar minyak (BBM).

Sementara itu, keseluruhan jumlah konsumsi energi nasional mencapai 700 juta SBM (setara barel minyak) per tahun, minyak bumi memasok sebesar 54,4%, disusul gas bumi 26,5%, dan batu bara 14,1%, sedangkan sisanya 5% dipenuhi dari tenaga air, panas bumi, biomassa, surya, dan sebagainya.

Semua negara di dunia atau para stakeholder yang concern akan energi kini serius berpikir bagaimana me-

Perbandingan kontrak harga LNG Tangguh ke Fujian, dan ke negara lainnya

Formula harga jual LNG Tangguh ke Fujian

$$P_n = 0,0525 \times JCC_n + A$$

P_n = harga kontrak

0,0525 = konstanta untuk masa komisioning

JCC_n = harga minyak mentah Jepang dengan batas atas US\$38/barel dan batas bawah US\$15/barel

A = konstanta untuk masa komisioning sebesar 1,35

Formula harga jual LNG Badak ke Korea

$$P_a = \frac{P_i (A_x) - R}{(A_y)}$$

P_a = harga kontrak

P_i = US\$5,391/juta Btu

A_x = harga ICP

A_y = US\$34,5911, harga ICP per 1 Januari 1983

R = konstanta US\$0,10

Formula harga jual LNG Arun ke Jepang

$$P_a = \frac{X (P_o) (A_x) + y}{(A_y)}$$

P_a = harga kontrak

X = bernilai 0 jika ICP < US\$11/barel

bernilai 0,091541 jika ICP > US\$11/barel < US\$15/barel

bernilai 1 jika ICP > US\$15/barel < US\$24,5/barel

bernilai 0,4700 jika > US\$24,5/barel

P_o = US\$5,78

A_x = harga minyak mentah Indonesia (ICP)

A_y = US\$35,69, harga ICP per 1 Januari 1981

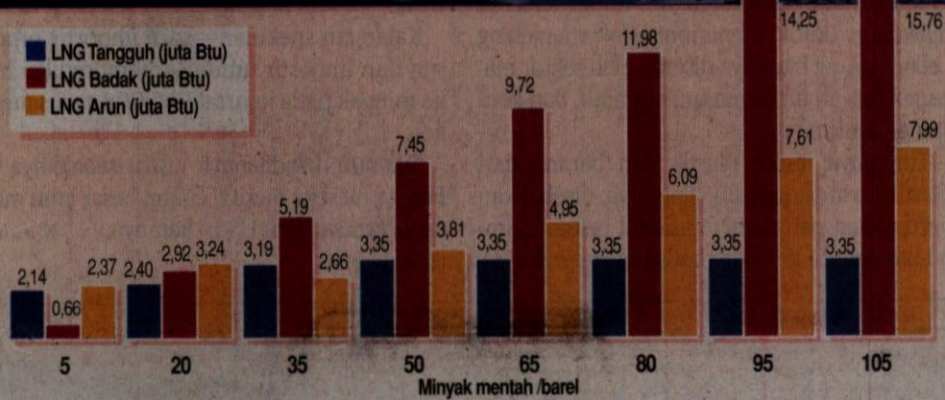
Y = bernilai 2,3700 jika ICP < US\$11/barel

bernilai 2,26069 jika ICP > US\$11/barel < US\$15/barel

bernilai 0 jika ICP > US\$15/barel

Perbandingan harga LNG Tangguh, Arun, dan Badak (US\$)

■ LNG Tangguh (juta Btu)
 ■ LNG Badak (juta Btu)
 ■ LNG Arun (juta Btu)



Sumber: Berbagai sumber, diolah

BISNIS/ ADI PURDIYANTO

ngelola serta menghemat pemakaian energi sebaik-baiknya, guna mengurangi krisis dan konflik energi yang mungkin akan timbul pada masa depan.

Kini, banyak pihak di dunia mengusahakan penggunaan energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan dan menghemat penggunaan energi fosil yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, gas dan lain-lain.

Di dalam negeri sendiri, pemerintah ataupun NGO-NGO yang *concern*-nya sama sedang gencar mengampanyekan penggunaan energi alternatif sebagai langkah antisipasi atas kelangkaan BBM. Energi alternatif diyakini dapat mengurangi krisis energi minyak dan gas ataupun energi tak terbarukan lainnya.

Namun sayangnya, usaha ini belum menyentuh kepada masyarakat luas khususnya di *level* masyarakat paling bawah (*grassroot*). Jangankan bicara masalah energi alternatif oleh masyarakat awam, banyak dari kalangan pemerintah, pengusaha ataupun sebagian kaum intelektual juga tidak memahami pentingnya menghemat energi sedini mungkin dan beralih ke energi alternatif.

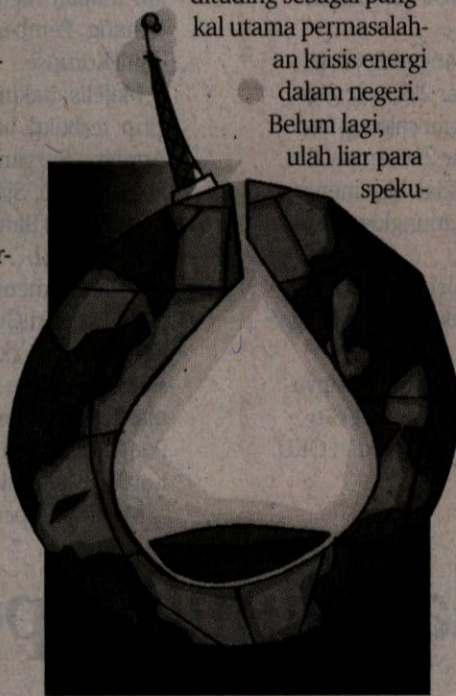
Banyak masyarakat sulit beradaptasi/enggan beralih dari penggunaan energi berbahan bakar minyak ke energi alternatif lainnya. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan dan lamanya masyarakat menggunakan energi berbahan bakar minyak selama puluhan tahun (mungkin dari awal berdirinya bangsa ini).

Cadangan minyak nasional yang ada kini diperkirakan hanya dapat di-

gunakan untuk konsumsi 10-15 tahun. Budaya berhemat dan mulai mau menggunakan alternatif energi lainnya harus sejak dini ditanamkan.

Pemerintah harus segera melakukan perbaikan sistem dan tata kelola energi nasional yang baik, terarah, rasional dan bertanggung jawab. Karena, selama ini sistem tata kelola energi nasional terkesan parsial, sektoral dan reaksioner jangka pendek

dituding sebagai pangkal utama permasalahan krisis energi dalam negeri. Belum lagi, ulah liar para speku-



BISNIS/ADI PURDIYANTO

lan minyak yang sulit diredam, apalagi diberantas!

Tidak berjalan efektif

Tata kelola energi nasional terpadu sebagai landasan kerja implementasi pemerintah dalam penerapan kebijakan, program, dan ketegasan hukum yang berkaitan dengan tata kelola energi nasional tidak berjalan efektif.

Kondisi ini diperburuk lagi oleh sistematisasi program pengelolaan energi yang tidak menghiraukan urutan-urutan pencapaian, yang berdasar pada kepentingan seluruh bangsa, serta tiadanya keterbukaan serta akses masyarakat dalam pengelolaan energi nasional.

Padahal sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang strate-

gis dan sangat penting bagi hajat hidup orang banyak, harus dikuasai negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945, Ayat 1-3), serta dikelola secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, dan terpadu untuk menjamin kemandirian nasional.

Harus kita ingat bahwa situasi geopolitik internasional yang menyangkut masalah energi dan disparitas harga energi di pasar nasional dan internasional ditengarai telah memengaruhi krisis energi dalam negeri. Aksi para spekulator (*trader* tanpa aset) minyak dalam dan luar negeri juga disinyalir sebagai penyumbang terbesar krisis energi dunia.

Semua situasi di atas menyebabkan rapuhnya kedaulatan bangsa dan negara terhadap ketahanan/kemandirian energi nasional. Situasi ini akan memiliki efek domino terhadap berbagai lini kehidupan lainnya, yakni melonjaknya kemiskinan dan pengangguran, angka putus sekolah usia dini, buruknya pelayanan kesehatan dan pelayanan umum (transportasi), serta rusaknya sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kondisi-kondisi tersebut juga merupakan cermin dari penegakan hukum yang inkonsisten serta pengelolaan dan ketahanan energi nasional yang lemah.

Keadaan harus segera diubah agar bangsa ini tetap eksis dan berjalan sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan dan para *founding father*. Perlu ada kebijakan energi yang *sustainable* dan terencana serta bertanggung jawab oleh pemerintah dengan melakukan efisiensi energi secara serempak dan nasional.

Apel akbar dan ikrar untuk hemat energi nasional yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu merupakan langkah awal yang baik. Namun, untuk mewujudkan langkah itu di tingkat implementasi perlu upaya yang nyata dari pemerintah. Jangan sampai ikrar hemat energi nasional itu hanya jalan di tempat dan hanya *lips service*.

Upaya nyata itu adalah mengelola energi nasional dengan sistem tata kelola energi yang terpadu. Sistem tata kelola energi nasional yang terpadu dengan menargetkan efisiensi energi per wilayah akan memudahkan pemerintah melakukan pemetaan penyebaran dan kebutuhan konsumsi energi secara nasional.

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 2

TAHUN 2008

■ AUDIT BBM

BPK Sudah Menggelar Audit Impor BBM Sejak Awal September

JAKARTA. Diam-diam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata sudah mulai melakukan audit terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) oleh PT Pertamina. Audit ini masuk dalam kategori audit dengan tujuan tertentu. Artinya, BPK menyelenggarakan audit karena ada kecurigaan.

Auditor Utama BPK Widodo Mumpuni mengaku, sejak awal September ini BPK sudah mulai mencari keterangan dari pihak yang berurusan dengan impor BBM. "Kami memperkirakan audit impor ini membutuhkan waktu 1,5 bulan," ucap Widodo, kepada KONTAN, Kami (4/9). Sebelumnya, instruksi audit ini mencuat saat BPK memberikan keterangan dalam Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket BBM, Rabu (3/9).

Sebagai langkah awal, BPK akan menyelidiki kontrak antara Pertamina dengan pihak ketiga atau *broker* impor. Kontrak tersebut biasa terjadi setelah Pertamina menentukan *broker* yang menjadi pemenang dalam tender impor BBM.

Selain memeriksa isi kontrak, BPK saat inipun mulai meminta penjelasan dari Pertamina dan anak-anak usahanya. Anak usaha Pertamina yang bakal mendapat sofaton BPK ialah Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Petral adalah anak usaha Pertamina yang terlibat langsung dalam impor BBM.

Berhubung sebagian besar para *broker* kantor di Singapura, BPK pun harus menyambangi Negeri Merlion itu. BPK akan meminta konfirmasi dari *broker* impor BBM yang biasa memasok Pertamina, seperti Shell Singapore, RIM Intelligent, dan Platts of Singapore. Tim BPK akan berangkat ke Singapura seusai Lebaran nanti.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Sudirman Said menyatakan, Pertamina siap memberikan keterangan dan data kepada BPK selama proses audit impor BBM. "Setiap tahunnya kami diperiksa oleh BPK. Maka kami siap membantu BPK bila memang ingin melakukan audit yang dikhususkan untuk hal tertentu," kata Sudirman.

Pasalnya, Sudirman menambahkan, Pertamina tidak ingin melanggar peraturan karena dianggap tidak mau membantu memperlancar proses audit BPK. "Adalah kewenangan BPK melakukan pemeriksaan maka kami siap membantu," katanya.

Karena audit ini masih tahap awal. Widodo pun belum bisa memperkirakan apakah ada kerugian negara dalam impor BBM. "Justru hal itulah yang ingin kami cari tahu dan sesuai peraturan kami tak boleh mereka-reka," kata Widodo singkat.

Sekadar mengingatkan, DPR sebenarnya meminta BPK tak sekadar melakukan audit soal impor BBM melainkan juga soal minyak dan gas. Audit itu berlaku dari sektor produksi hingga ke tata niaga migas.

Permintaan audit ini bagian dari kerja Pansus Hak Angket BBM. Lewat audit BPK inilah para anggota DPR ingin mendapat bukti yang sah untuk menelisik lebih jauh kebijakan pemerintah di bidang migas.

Martina Prianti

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 11

TAHUN 2008

■ INVESTASI PT JAMSOSTEK

Rencana Pembelian Saham PGN Baru Sebatas Kajian

JAKARTA. Jamsostek menampik tuduhan akan menempatkan saham secara terbatas (*private placement*) di Perusahaan Gas Negara (PGN) lewat pembelian 7% saham dalam waktu dekat. Saat ini, pengelola Jamsostek masih mengkaji untung rugi pembelian saham PGN. "Kami tak boleh sembarang memutuskan. Investasi dalam bentuk saham risikonya besar," ujar Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga Kamis (4/9).

Apalagi, ucap Hotbonar, pembelian 7% saham PGN membutuhkan dana yang sangat gede. Harga penutupan saham PGN yang mempunyai kode perdagangan PGAS di Bursa Efek Indonesia, kemarin (4/9), Rp 2.350 per saham. Jika total saham PGAS yang beredar 22,96 miliar, berarti untuk membeli 7% saham PGN, Jamsostek harus menyediakan dana tak kurang dari Rp 3,78 triliun.

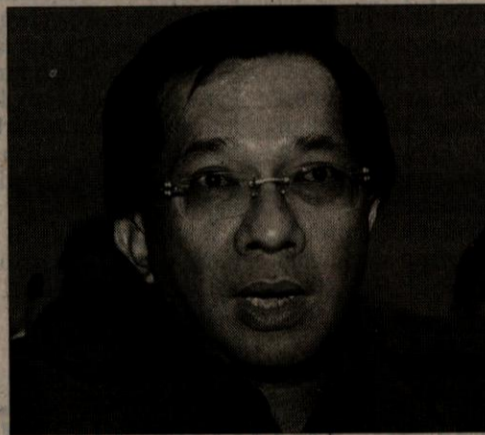
Hotbonar mengakui, Jamsostek memang mempunyai niat membeli saham PGN. Tapi tetap saja, pengelola Jamsostek harus berhati-hati dalam melakukan *private placement*. "Jadi harus ada kajian menyeluruh terlebih dahulu," imbuh Hotbonar.

Di luar saham PGN, Hotbonar mengakui Jamsostek berniat membeli beberapa saham perusahaan lain untuk memenuhi target. Pengelola Jamsostek memasang target sebesar 20% dana kelolaan investasi Jamsostek akan ditempatkan dalam saham. Sampai akhir semester pertama 2008, penempatan dana kelolaan investasi Jamsostek di saham sudah mencapai Rp 10,9 triliun atau 17,93% dari total dana kelolaan.

Selain saham PGN, Jamsostek juga tertarik membeli saham Bank Tabungan Negara (BTN) jika bank pelat merah itu jadi melakukan penawaran saham perdana di pasar saham. "Kriteria kami, saham tersebut termasuk kategori *blue chips*," tambahnya.

Jamsostek juga memasang syarat hanya akan berinvestasi di emiten yang punya prospek bisnis cerah. Misalnya, perusahaan yang hasil produksinya banyak dibutuhkan dan diminati oleh masyarakat. Seperti perusahaan pengelola sumberdaya alam.

Kalau Jamsostek jadi untuk membeli sa-



KONTAN/Achmad Fauzie

Hotbonar Sinaga.

ham PGN, rencananya mereka akan mencairkan deposito yang mereka simpan di bank.

Hingga kini total dana kelolaan Jamsostek sudah mencapai Rp 61,04 triliun. Sebanyak 46,49% dana kelolaan atau setara Rp 28,4 triliun ditempatkan dalam obligasi. Sementara 28,82% dana kelolaan atau Rp 10,94 triliun berupa deposito. Jamsostek juga menempatkan dana di saham, reksadana dan properti.

Pada akhir tahun 2008, Jamsostek menargetkan dapat mengelola dana investasi sebesar Rp 68,42 triliun. Jamsostek berharap jumlah peserta baru sepanjang tahun ini mencapai 2,5 juta orang. Jadi, total peserta di akhir tahun menjadi 26 juta peserta. Perolehan iuran Jamsostek di paruh pertama sebesar Rp 4,11 triliun, atau 41,27% dari perolehan sepanjang tahun ini, yaitu Rp 9,96 triliun.

Jamsostek mencatat hasil investasi sebesar Rp 3,79 triliun, naik 8,6% dari hasil semester pertama 2007, yaitu Rp 3,49 triliun. Laba Jamsostek semester pertama 2008 mencapai Rp 544,1 miliar dari target 2008 sebesar Rp 1,1 triliun. "Kami optimistis target ini bisa tercapai bahkan sangat mungkin terlampaui," kata Hotbonar.

Magdalena Sihite

68

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEP** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 23

TAHUN 2008

Ilusi Dana Cost Recovery

Indah D. Qurbani,
Berkhidmat di Ilmu Hukum Pascasarjana Unej

Sektor ekonomi ekstraktif (pertambangan) relatif tertutup, terutama berkaitan dengan penerimaan dana *PSC (Production Sharing Contract)*. Ketertutupan sektor ini, membuat asal usul realisasi penerimaan migas yang tertulis dalam realisasi APBN nyaris tidak bisa ditelusuri. Apalagi bila perhitungan penerimaan itu dikaitkan dengan dana *cost recovery (CR)*.

Tak heran bila Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas dan Direktur Jenderal Migas, meminta pemerintah secara khusus agar benar-benar menghitung untung rugi memasukkan produksi minyak Chevron Pacific Indonesia ke dalam bagian minyak yang siap jual (*lifting*). Sebab, masuknya produksi Chevron menambah dana CR tahun 2009 sebesar US\$ 2 miliar.

Sifat kerahasiaan semacam ini kerap memicu tingginya tingkat korupsi ekstraksi khususnya hidrokarbon. Proses negosiasi mendapatkan *PSC*, proses penghitungan bagi hasil, proses penjualan, proses tender, dan sebagainya semua dilakukan nyaris dengan kondisi yang lepas dari pengamatan publik. Malah, dokumen yang menyangkut sebagian besar bisnis proses dinyatakan sebagai dokumen rahasia, yang bahkan dilegalkan UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas (Migas).

CR sebuah ilusi

Sungguh pun sistem kontrak bagi hasil migas di atas kertas tampaknya porsi yang diterima negara lebih besar ketimbang porsi kontraktor migas, yaitu antara 70%:30% hingga 85%:15%, belum tentu bagi hasil ini memberikan keuntungan maksimal bagi rakyat Indonesia. Sebab, pembagian itu merupakan porsi *net income*, yang masih harus dipotong dengan biaya operasional, pengeboran dan eksplorasi, yang dikenal dengan dana CR.

CR merupakan sebuah fitur penting lain dalam industri ekstraksi hidrokarbon, tidak hanya di Indonesia juga di seluruh dunia. CR adalah sebuah ilusi yang memungkinkan kontraktor migas mendapatkan penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam masa eksplorasi (yang menghasilkan migas) dan eksploitasi oleh pemerintah.

Dalam ketentuan Migas yang baru bahkan memungkinkan kontraktor migas untuk meminta persetujuan anggaran atau *Authorized Financial Expenditure (AFE)* dari pemerintah melalui BP Migas hingga 100% dari total biaya yang telah dikeluarkan. Tidak hanya itu, khusus bagi kontraktor yang mau mengeksplorasi tambang marginal, BP Migas berani menawarkan insentif CR mencapai 120%. Artinya, biaya eksplorasi dan eksploitasi kontraktor migas hampir mendekati nol. Kontraktor hanya menanggung risiko kalau eksplorasi tidak menghasilkan migas.

Di lain pihak, proses CR membuka peluang terjadinya *mark up* dan manipulasi data. Apalagi, tidak ada standar baku tentang apa yang boleh dan tidak dimasukkan ke dalam komponen CR. Semuanya bergantung dari negosiasi dengan BP Migas yang keputusannya bersifat *arbitrary*.

Dengan begitu, dalam komponen CR terbuka

segala kemungkinan untuk meningkatkan jumlah biaya yang diganti. Termasuk *transfer pricing* yang didukung bukti-bukti akuntansi material. Biaya-biaya telah masuk ke dalam komponen CR sulit dilacak. Karena telah dibukukan secara rapi oleh pihak kontraktor minyak dan diaudit BPKP sebagai internal auditor pemerintah.

CR tidak pernah disebut secara spesifik dalam kontrak PSC. Hanya disebutkan bahwa kontraktor menyediakan pendanaan, keahlian teknologi, dan menanggung segala risiko dari eksplorasi. Soalnya, CR hanya metode penghitungan pengembalian dana yang dikeluarkan oleh kontraktor.

Menyiasati CR

Untuk meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan dari ilusi CR yang selama ini dikembangkan. Ada beberapa hal yang perlu dibenahi.

Pertama, proses birokrasi yang selama ini melibatkan Departemen ESDM, Ditjen Migas, BP Migas, pemda, dan DPR, khususnya terkait dengan penetapan kontrak, WP&B, AFE, dan POD, serta penetapan kebijakan lainnya harus menutup peluang terjadinya korupsi.

Kedua, pelaksanaan kontrak PSC mulai dari pengadaan *equipment* yang kerap dilakukan melalui *leasing* (bukan pembelian) telah menyebabkan kerugian negara. Di samping itu, *leasing* tidak menjadikan aset yang didatangkan sebagai milik negara, sementara di sisi lain dana yang dibutuhkan untuk *leasing* justru dialokasikan dalam perhitungan CR.

Ketiga, dalam setiap kontrak PSC biasanya selalu diperinci secara spesifik *point of lifting* (untuk minyak) dan *delivery point* (untuk gas) yang menjadi *cut-off* antara eksplorasi, eksploitasi, dan tahapan selanjutnya. Biaya yang terjadi di luar masa eksplorasi dan eksploitasi tersebut (termasuk biaya pemasaran) selama ini justru dibebankan dalam perhitungan CR.

Fakta ini menyebabkan berkurangnya bagian pemerintah dari *equity to be split*. Tidak berhenti sampai di sini, misalokasi juga merambah ke dunia internasional, di mana perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia adalah bagian dari perusahaan induknya yang beroperasi secara internasional (*worldwide*).

Misalokasi pembebanan biaya dari kantor pusatnya (di luar negeri) ke *operating cost* PSC di Indonesia telah banyak terjadi. Hal ini semakin memperbesar CR dan mengurangi penerimaan negara.

Untuk memperbaiki pengelolaan pendapatan dari minyak, gas, dan tambang. Pemerintah harus menjalankan secara transparan baik dalam transaksi maupun dalam proses bisnis sektor migas (termasuk mineral). Sebab, tidak ada alasan yang dapat diterima tentang argumentasi "kerahasiaan" dalam industri ini.

Biasanya alasan rahasia dalam transaksi dan proses bisnis hanya yang berhubungan dengan persaingan usaha antarperusahaan swasta terhadap barang-barang privat (*private goods*). Sumber daya alam bukanlah *private goods*, tapi merupakan *public good*. Satunya-satunya yang dapat dikategorikan rahasia adalah kemampuan kontraktor untuk menemukan minyak. Begitu eksplorasi selesai dan kontrak ditandatangani, semua informasi harus dapat diakses oleh publik. Di negara-negara yang sudah maju pengelolaan sumber daya alamnya dijalankan secara transparan.

